

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KAJIAN IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN
GAMPONG KUTA ATEUH SETELAH PERUBAHAN
STATUS DARI KELURAHAN MENJADI GAMPONG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

PUTRA AGUS FITRIADY

NIM: 018873882

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kajian Implementasi Fungsi Manajemen Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status dari Kelurahan Menjadi Gampong

Putra Agus Fitriady
poetrasbg@yahoo.co.id
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Kata Kunci : Fungsi Manajemen, Gampong Kuta Ateuh, dan Perubahan Status

Penelitian ini menganalisis implementasi fungsi manajemen gampong kuta ateuh setelah perubahan status dari kelurahan menjadi gampong. Penelitian ini bertujuan 1). untuk mengetahui sistem manajemen yang dijalankan di gampong kuta ateuh setelah perubahan status dari kelurahan menjadi gampong. 2). Mengetahui tingkat efektifitas manajemen gampong kuta ateuh setelah perubahan status tersebut. 3). Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat fungsi manajemen gampong kuta ateuh kecamatan sukakarya sabang kota sabang.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* yaitu gabungan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif (Creswell, 2009: 6). Pendekatan kualitatif untuk menganalisis manajemen pengelolaan gampong kuta Ateuh. Pendekatan kuantitatif manajemen pengelolaan gampong kuta Ateuh dengan mereduksi variabel internal dan variabel eksternal dengan menggunakan analisis faktor melalui angket dengan beberapa responden.

Subjek dan sampel yang digunakan adalah 9 orang yang berasal dari gampong kuta ateuh. Hal ini untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil dari kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi manajemen yang dijalankan di gampong kuta ateuh setelah perubahan status telah menunjukkan tanda-tanda yang positif, artinya dengan adanya perubahan status, bukan berarti manajemen yang dijalankan di gampong Kuta Ateuh menjadi lebih buruk, tetapi tergolong stabil dan termasuk ke dalam kategori cukup. Maksud dari stabil yaitu tertuju kepada adanya beberapa item penting dari manajemen, yaitu; stabil dalam perencanaan, stabil dalam pengorganisasian, stabil dalam pengarahan, stabil dalam melakukan koordinasi dan serta stabil dalam hal pengendalian. Istilah stabil ini tertuju kepada tidak adanya semacam menurunnya kualitas secara drastis, dan termasuk ke dalam kategori baik.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

JUDUL TAPM : Kajian Implementasi Fungsi Manajemen
Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status
Dari Kelurahan Menjadi Gampong

Penyusun TAPM : Putra Agus Fitriady

NIM : 018873882

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Ir. Agussabti, M. Si
NIP. 19680408 199303 1 004

Pembimbing II

Daryono, SH, MA, Ph.D.
NIP. 19640722 198903 1 009

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister
Pascasarjana Ilmu Manajemen
Administrasi Publik
Minat Magister Administrasi Publik

Florentina Ratih Wulandari, S.Pd M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana

Sueiati, M.Sc Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Putra Agus Fitriady
 NIM : 018873882
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul Tesis : Kajian Implementasi Fungsi Manajemen Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status Dari Kelurahan Menjadi Gampong

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/ tanggal : 24 Juni 2014

Waktu : 16.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
 Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Penguji Ahli :
 Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si

Pembimbing I :
 Dr. Ir. Agussabti, M. Si

Pembimbing II :
 Daryono, SH, MH, Ph.D

.....

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Kajian Implementasi Fungsi Manajemen Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status Dari Kelurahan Menjadi Gampong adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, Juni 2014

Yang Menyatakan,

Putra Agus Fitriady
NIM. 018873882

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENBANTU RANGSA
TGL. 20
BB9C3ABF72630698
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

KATA PENGANTAR

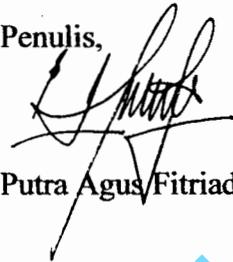
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya TAPM ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Judul TAPM ini adalah **“Kajian Implementasi Fungsi Manajemen Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status dari Kelurahan Menjadi Gampong”**. TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh selaku penyelenggara Program Pascasarjana
3. Pembimbing I dan Pembimbing II Bapak Dr.Ir.Agussabti, M.Si dan Bapak Daryono,SH,MA,Ph.D yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Kabid Program Ilmu Manajemen Administrasi Publik selaku penanggung jawab program Pascasarjana;
5. Orang Tua dan Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Banda Aceh, Juni 2014

Penulis,



Putra Agus Fitriady

Universitas Terbuka

Riwayat Hidup

Nama : Putra Agus Fitriady
NIM : 018873882
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Sabang, 02 Agustus 1982
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Sabang pada tahun 1993
Lulus SMP di Sabang tahun 1996
Lulus SMA di Sabang tahun 1999
Lulus S1 di di Banda Aceh pada tahun 2005
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2001 s/d sekarang sebagai PNS di Dinas
Kesehatan Kota Sabang

Sabang, Jani 2014


Putra Agus Fitriady
NIM . 018873882

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kajian Teori	8
2.1.1. Konsep Manajemen	8
2.1.2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	10
2.1.3. Organisasi Pemerintah	19
2.1.4. Perubahan Status Organisasi Pemerintah	20
2.1.5. Pemerintahan Desa.....	21
2.1.6. Tugas Pemerintah Desa	27
2.1.7. Administrasi Keuangan Desa	30
2.1.8. Keuangan Desa	32
2.1.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	34
2.2. Kajian Sebelumnya	36
2.3. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	41
3.1. Desain Penelitian	41
3.2. Subjek Penelitian	42
3.3. Teknik Sampling	42
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5. Instrumen Penelitian.....	43
3.6. Metode Analisis data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	47
4.1.1. Profil Gampong Kuta Ateuh	47
4.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Gampong	51
4.1.3. Kebijakan Umum Anggaran	54
4.1.4. Sosial Budaya.....	56
4.1.5. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.....	57

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	62
4.2.1. Sistem Manajemen di Gampong Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong	63
4.2.2. Efektifitas Manajemen di Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status dari Kelurahan Menjadi Gampong	81
4.2.3. Faktor-Faktor Yang Mendorong dan Menghambat Fungsi Manajemen Di Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status dari Kelurahan Menjadi Gampong	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran.....	110
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu amanat penting yang menjadi tugas negara adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan disebutkan dalam UUD 1945 tentang pembagian pemerintahan negara Indonesia dari besar ke kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya yang diatur oleh undang-undang. Sebagaimana yang telah diatur dalam penjelasan pasal 18 UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara yang bersifat otonom, maka dari pada itu suatu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengatur di sini berarti membuat aturan-aturan yang disesuaikan dengan peraturan yang ada di pusat, sedangkan mengurus dapat dikatakan sebagai melaksanakan urusan sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dengan otonomi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan juga prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikkian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama

:

dengan daerah lainnya dan pada dasarnya penyelenggaraan otonomi untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Atas dasar kriteria akuntabilitas, dimana pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin. Penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan kewenangan daerah, dalam hal ini adalah kewenangan kabupaten/kota, maka pelayanan administrasi umum pemerintahan yang termasuk dalam kewenangan kabupaten/kota dan juga termasuk urusan wajib dapat dijadikan dasar atas pembentukan kelurahan yang ada di kabupaten/kota.

Era otonomi daerah telah mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakibat lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan daerah. Atas dasar tersebut Pemerintah Kota Sabang dengan dasar PP 72 tahun 2005 (pasal 5) yang kemudian untuk melaksanakan ketentuan tersebut dikeluarkan kembali Permendagri No.28 tahun 2006 mengenai perubahan status dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan penataan wilayah, pemerintah daerah membentuk suatu kebijakan untuk mendukung hal tersebut mengenai

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dalam bentuk perubahan status daerah, baik dari gampong menjadi kelurahan ataupun kelurahan menjadi gampong. Ini dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Sukakarya, khususnya Gampong Kuta Ateuh yang telah berubah statusnya dari kelurahan menjadi gampong pada tahun 2010.

Proses perubahan status kelurahan menjadi gampong akan menimbulkan berbagai implikasi tertentu, baik di bidang keuangan gampong, kelembagaan gampong, status kepegawaian perangkat gampong, dan juga termasuk tentang koordinasi pemerintah gampong. Diperlukan suatu persiapan yang tersistematis dan terorganisir dalam melaksanakan proses perubahan status kelurahan menjadi gampong tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang dapat menghambat proses perubahan status tersebut. Suatu kelurahan mempunyai keuntungan dan kelemahan tertentu dibandingkan dengan gampong, dimana kelurahan mempunyai aparatur yang lebih tepat sasaran di bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi pemerintahan sendiri. Hal ini disebabkan sistem pemerintahan kelurahan lebih banyak aparatur yang menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, para aparturnya lebih paham dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan tingkat kelurahan yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan tidak mempunyai suatu otonomi dalam bidang menyelenggarakan sistem pemerintahannya, karena lurah berada langsung dibawah pemerintahan kecamatan dan lurahnya sendiri langsung ditunjuk oleh atasan tertinggi di Daerah tersebut.

Disisi lain Gampong adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur daerah kekuasaannya pemerintahan gampong tidak berada langsung di bawah kepemimpinan kecamatan itu karena kepala gampong dipilih melalui pemilihan/ pemilihan langsung dari masyarakat. Namun pemerintahan gampong merupakan sipil biasa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya ada satu PNS yaitu Sekretaris Gampong (sekdes) sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahannya mengalami sedikit hambatan. Dalam sistem pemerintahan gampong ada satu yang menjadi unggulan yaitu pada setiap gampong mempunyai alokasi tersendiri yaitu Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diberikan oleh pemerintah namun pada Kelurahan tidak mendapatkan dana alokasi tersebut.

Berdasarkan kecenderungan isu saat ini banyak kelurahan di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia yang lebih memilih kembali merubah statusnya yang tadi kelurahan kembali menjadi gampong pada umumnya karena pada tingkat pemerintahan kelurahan tidak mendapatkan dana alokasi tersebut namun pada tingkat gampong/gampong sudah dianggarkan untuk mendapatkan Alokasi Dana Gampong (ADG). Dengan terbitnya Peraturan Kota Sabang tahun 2010 tentang perubahan status gampong menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi gampong, maka perubahan status kelurahan menjadi gampong telah resmi disyahkan. Sehingga melalui Surat Keputusan Wali Kota Sabang, tentang pembentukan tim pengkajian perubahan status dalam wilayah Kota Sabang 2007, team bekerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memberikan

rekomendasi terhadap beberapa gampong yang layak untuk dilakukan perubahan status gampong menjadi kelurahan tersebut dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian tadi, maka menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status dari kelurahan menjadi Gampong, sebab antara gampong dan kelurahan masing-masing memiliki karakteristik tertentu yang menarik untuk dicermati. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang perubahan status ini, melalui topik penelitian "**Kajian Implementasi Fungsi Manajemen Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status Dari Kelurahan Menjadi Gampong**".

1.2. Perumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini berkaitan dengan perubahan status kelurahan menjadi gampong, Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah berikut ini, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem manajemen yang dijalankan di gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status dari kelurahan menjadi Gampong?
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas manajemen gampong kuta ateuh setelah perubahan status tersebut?
3. Faktor pendorong dan penghambat fungsi manajemen Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem manajemen yang dijalankan di gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status dari kelurahan menjadi Gampong.
2. Mengetahui tingkat efektifitas manajemen gampong kuta ateuh setelah perubahan status tersebut.
3. Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat fungsi manajemen gampong kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

1.4. Kegunaan penelitian

Penelitian ini adalah sebuah usaha persiapan terkait program pemerintah dalam mewujudkan *good governance* di gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga mengenai pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan di Gampong Kuta Ateuh.
2. Manfaat praktis, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a. Sebagai masukan/bahan pertimbangan bagi pemerintah tingkat Gampong/gampong sebagai pelaksana administrasi dan pemerintahan pada organisasi pemerintahan tingkat gampong.

- b. Sebagai masukan/bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi lebih lanjut pelaksanaan rencana pemekaran ke depan.
- c. Sebagai masukan bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pelaksanaan administrasi di tingkat pemerintahan gampong.

Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Konsep Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (Jeliteng, 2012).

Sementara itu, Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Dengan kata lain efektif menyangkut tujuan dan efisien menyangkut cara dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut (Jeliteng, 2012). Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen

sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan antar pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai alat pencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. menurut Salih (Hasibuan 2004:37) bahwa manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa manajemen itu merupakan suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain, diarahkan atau dikelompokkan kepada sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu, baik berupa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya melalui tindakan-tindakan berantai dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan tujuan itu dapat dicapai dengan cepat, tepat serta sesuai dengan rencana. pengertian manajemen menurut, Hasibuan (2004:34) adalah :

“Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan koperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

lebih dahulu. G.R. Terry dalam Hasibuan (2004) bahwa: *Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.* Berdasarkan pendapat ini, dapat di katakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POACC) yaitu: *Planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (Penggerakan), *controlling* (Pengawasan) dan koordinasi (*coordinating*).

Berdasarkan pendapat di atas, fungsi manajemen tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. menurut, Dharma Setyawan (Hasibuan, 2004) sebagai berikut: *Pertama*, perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Hasibuan (2004:38) bahwa: “perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan” Berdasarkan penjelasan diatas, perencanaan adalah usaha untuk melakukan tindakan/pekerjaan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan pada masa akan datang. Jenis-jenis rencana menurut Hasibuan (2004;39) itu ialah:

1. Kebijakan adalah pernyataan atau pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan.
2. Anggaran adalah suatu ihtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut dinyatakan dalam kesatuan uang.
3. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian yang harus dilaksanakan.

Bertolak ukur dari pendapat diatas, bahwa fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara proposional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang

dijelaskan oleh Hasibuan (2004:43), Ada beberapa keuntungan dalam perencanaan yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan tujuan jelas, obyektif dan rasional.
2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan ekonomis.
3. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan semua fasilitas yang dimiliki.
4. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat.
5. Perencanaan dapat memperkecil resiko.
6. Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian.
7. Perencanaan merangsang prestasi kerja.
8. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap.

Keuntungan dalam perencanaan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam merumuskan sesuatu pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Ada beberapa syarat menurut Hasibuan (2004; 43) perencanaan yang baik adalah: merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan, perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta, menetapkan beberapa alternatif dan putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana. Perencanaan yang dilaksanakan dengan baik, maka akan dihasilkan suatu rencana yang baik dengan memperhatikan syarat-syarat perencanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama.

Kedua, Fungsi pengorganisasian/fungsi pembagian kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian Pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan dan menunjukkan garis-garis perintah serta hubungan-hubungan yang ada. Organisasi hanya merupakan alat, dan wadah tempat seorang pemimpin

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan Pengorganisasian dengan organisasi adalah hasil dari pengorganisasian yaitu apabila organisasi baik, maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai. Organisasi ini terdiri dari dua bagian dasar yaitu: Bagian-bagian/departemen/devisi, dan Hubungan-hubungan, yakni hubungan antar manusia, antar departemen yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas. Penetapan hubungan-hubungan ini merupakan salah satu syarat tercapainya kerja sama (*Team work*) antara pegawai. Pengorganisasian menurut Hasibuan (2004; 45) sebagai berikut :

“pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut”

Berdasarkan pendapat diatas, pengorganisasian adalah kelompok orang yang bekerja sama, dengan adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, serta adanya pendelegasian wewenang, dalam hal ini menurut Hasibuan (2004; 47) bahwa.

“Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan”

Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi pengorganisasian ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan

wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti pendelegasian wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan informasi vertikal dan horizontal, dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2004: 54) ada beberapa tahap dalam proses pengorganisasian yaitu:

1. Penentuan kegiatan adalah seorang pimpinan harus mengetahui dan merumuskan kegiatan yang diperlukan serta menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Pengelompokan kegiatan harus mengelompokkan kegiatan atas dasar tujuan yang sama, hal ini berdasarkan atas dasar proses atau peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan.
3. Pendelegasian wewenang adalah seorang pemimpin harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada bawahan.

Ketiga, Fungsi pengarahan dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh sumberdaya yang telah direncanakan dan diorganisir untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tercapainya tujuan bukannya hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada penggerakan dan pengawasan. penggerakan menurut Hasibuan (2004) yaitu: Penggerakan adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Menurut Setyawan (Hasibuan, 2004) yaitu: "Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas

serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”

Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, mengarahkan dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Menurut Hasibuan (2004;56) bahwa ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan penggerakan yaitu:

1. Motivasi adalah suatu keahlian seorang pemimpin dalam mengarahkan bawahannya agar tercapainya organisasi.
2. Kepemimpinan adalah merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Sikap dan moral seorang pimpinan dalam membina kerja sama, harus mampu memahami perilaku bawahannya.
4. Komunikasi adalah informasi, pesan yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan ditafsirkan sama oleh orang lain.

Keempat, Tahap selanjutnya yaitu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena:

1. Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.
2. Pengawasan hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan/rencana.
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik.

4. Tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengawasan sangat menentukan baik/buruknya pelaksanaan suatu rencana. menurut Hasibuan (2004: 58) adalah: "Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar". Berdasarkan pendapat di atas, pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan supaya tujuan yang di hasilkan sesuai yang direncanakan. hal ini sejalan dengan pendapatnya Dharma Setyawan (2004) pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. jika terdapat tindakan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan maka diperlukan tindakan korektif/perbaikan sesuai dengan langkah,

prosedur, dan ukurannya yang telah ditetapkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan di masa yang akan datang. Menurut Hasibuan (2004:59) Beberapa proses pengawasan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.
2. Ukuran yang telah ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki.

Dengan adanya pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien. Efektivitas artinya berhasil guna, sedangkan efisien artinya berdaya guna. Menurut Emerson (Hasibuan, 2004) memberikan definisi sebagai berikut: *Effectiveness is measuring in term of attaining precibed goal or objektives* (Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya). Kemudian *The ratio of input to output, benefit to cost performance to the use of resources, as that which maximizes result which limited resources, in orther words, it was the relation between what is accomplished and what migh be accomplished* (efisien adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan hasil (*output*), antar keuntungan dengan biaya antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan).

Efektifitas suatu pengukuran untuk tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan efisiensi perbandingan yang terbaik antar *input* dan *output*, dengan kata lain hubungan apa yang harus telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan. Yang terakhir disebut dengan tahap koordinasi, dimana dilakukan secara internal maupun eksternal. Para manajer dalam organisasi diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal (Jeliteng, 2012). Lebih lanjut dijelaskan tentang konsep POACC sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu:

1. Fungsi perencanaan (*Planning*) adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.
2. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.
3. Fungsi pengarahan (*Directing/Leading*) Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
4. Fungsi pengendalian (*Controlling*) adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.

5. Fungsi koordinasi (*coordinating*) merupakan suatu aktifitas yang mengarah kepada bentuk kerjasama ataupun membangun hubungan dengan pihak lain, dalam hal ini baik pihak internal maupun eksternal, sehingga koordinasi dianggap sangatlah penting dalam mewujudkan efektifitas dan efesiensi suatu organisasi dalam yang didasarkan pada teori manajemen.

2.1.3 Organisasi Pemerintah

Pada dasarnya organisasi merupakan tempat bagi individu-individu untuk bekerjasama dalam mencapai tujuannya, yang tidak bisa dicapai oleh individu itu sendiri tanpa memasuki suatu organisasi. Dengan demikian organisasi memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Soffer (dalam Sutarto, 1993:36) bahwa organisasi adalah perserikatan orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja, dalam mana pekerjaan dibagi menjadi rincian tugas, diberikan diantara pemegang peranan dan kemudian digabung kedalam beberapa bentuk hasil. Beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Kemudian menurut Surianingrat (1992:10) pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan yang demokratis, pemerintahan dikator, dan lain-lainnya. Selanjutnya menurut Strong yang dikutip Syafie (2003:5), pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan

Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara. Dari beberapa pemaparan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi pemerintahan adalah beberapa orang yang membentuk suatu kelompok atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan melindungi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, kemudian wewenang tersebut diatur dalam perundang-undangan.

2.1.4 Perubahan Status Organisasi Pemerintahan

Semua organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu sendiri memiliki sifat dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Karakteristik masyarakat seperti itu menuntut organisasi untuk juga memiliki sifat dinamis. Tanpa dinamika yang sejalan dengan dinamika masyarakat, organisasi tidak akan *survive* apalagi berkembang. Ini berarti bahwa perubahan dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Secara terus menerus organisasi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Proses penyesuaian dengan lingkungan merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi organisasi modern.

Menurut Atkinson (1987 dan Brooten, 1978 dalam Nurhidayah, 2003:1), menyatakan definisi perubahan yaitu: merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Menurut Soejarno Soekanto (2010:210), status adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:247) organisasi pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merekayasa, dan mengubah lingkungan dengan menggunakan kewenangan, kekuatan, paksaan, dan kekerasan yang sah.

Dari beberapa pemaparan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan paradigma dengan tujuan meningkatkan kualitas suatu organisasi dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat dan secara organisasi mengalami suatu perubahan manajemen organisasi pemerintahan tersebut yang didasari tuntutan kebutuhan masyarakat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.5 Pemerintahan Desa

Sebelum kita membicarakan pemerintahan desa, ada baiknya kita melihat beberapa pendapat para ahli tentang *kampong* atau desa. Dalam hal ini menurut

Sunardjo dalam Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir (2006:9) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hokum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir (2006:15) menyatakan bahwa, "Desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administrative memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari Negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya".

Sedangkan pemerintah secara etimologis berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita yaitu sebagai berikut: Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Samual Edward Finer mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas (Syafie, 1998). Maka tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Yaitu: Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya

dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dan pemerintahan dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara. Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie (1998: 4-5) dalam bukunya yang berjudul "Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut:

"Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara".

Pendapat lain menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja (2003:24) dalam bukunya yang berjudul "Hubungan antar Lembaga Pemerintahan", pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut: "Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah".

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Kemudian, Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 mengartikan bahwa:

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa Widjaja (2003: 5) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pasmusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

2.1.6 Tugas Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas Dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pada itu, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. membina kehidupan masyarakat desa.
- f. membina perekonomian desa.
- g. mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Selain dari pada itu, pemerintah desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik, melaksanakan dan memperanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Selanjutnya Kepala Desa Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

2.1.7 Administrasi Keuangan Desa

Istilah Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau kelompok sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih memahami mengenai Administrasi Pemerintahan Desa, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Administrasi, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Desa. Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya, apabila administrasi ditelaah lebih dalam, terlihat bermacam-macam cara atau pekerjaan yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan.

Administrasi Pemerintahan berasal dari istilah asing *Administration* (inggris) atau *Bestuurs Administrasi* (Belanda) dapat diartikan sebagai berikut:

- a. fungsi-fungsi pengendalian administrasi oleh badan-badan atau instansi Pemerintah dari segala tingkatan guna melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan Pemerintah sesuai dengan wewenang masing-masing seperti ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penggunaan prinsip-prinsip serta ilmu administrasi Negara oleh badan-badan atau instansi Pemerintah agar terdapat tertib administrasi ialah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, pembagian wewenang, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sebagainya.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan dari tujuan Pemerintah Desa, di dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa peraturan-peraturan di dalam IGO/IGOB tersebut merupakan landasan mengenai struktur, pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Pamong Desa sejak tahun 1905. Seperti yang kita ketahui Administrasi merupakan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang/organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat dan dibantu oleh perangkat-perangkat Desa lainnya.

Menurut supriadi (1984:48) dalam bukunya “Desa Kita” mengartikan tentang Administrasi Pemerintahan Desa adalah: “Semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa yang terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hubungan kerja, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjalankan Pemerintahan Desa”. Kegiatan Tata Usaha Keuangan Pemerintahan Desa diantaranya yaitu:

- a. Kepala desa berkewajiban mengelola mengenai pendapatan dan pengeluaran keuangan desa.
- b. Mengerjakan pembukuan mengenai pendapatan dan pengeluaran keuangan milik Pemerintah Desa.
- c. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- d. Membuat pertanggungjawaban keuangan desa, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan Administrasi Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat-perangkat Desa lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2.1.8 Keuangan Desa

Keuangan menurut Nurdjiman Arsjad, dkk (1992:43) dalam bukunya yang berjudul “Keuangan Negara” bahwa makna keuangan atau *finance* yaitu menggambarkan segala kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Manullang (1998:32) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara” menjelaskan uang adalah sesuatu yang

diterima secara umum sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, juga bagi kekayaan berharga lainnya dan bagian pembayaran utang.

Kemudian Memesa (1995:54) dalam bukunya yang berjudul "Sistem Administrasi Keuangan Daerah" keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang". Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa keuangan adalah segala sesuatu tentang penerimaan, pengeluaran dan utang-utang atau berupa kegiatan penyusunan pendapatan dan belanja. Ketentuan sumber biaya pemakaian, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Telah dikemukakan, bahwa Desa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri membutuhkan biaya untuk membiayai penyelenggaraan roda Pemerintahan. Maka Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk mencari sumber pendapatan Desa sesuai dengan kemampuannya. Yang dimaksud dengan pendapatan Desa ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah sumber-sumber pendapatan Desa yang pada umumnya sebagai berikut:

- a. Dari pemerintah ialah sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Adapun jenis-jenis sumbangan dari Pemerintah Pusat, adalah sebagai berikut: Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari Pemerintah Pusat., bantuan dari Pemerintah Provinsi, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.,

sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan, dan sebagian pajak dan retsibusi yang diberikan kepada Desa.

- b. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai sebutan, seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, dan lain-lain.
- c. Dari pihak ketiga adalah Pemerintah Desa dapat menerima sumber dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, badan-badan dan organisasi.
- d. Dari kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa bersangkutan, kekayaan desa tersebut di atas terdiri atas: tanah kas, pasar desa, bangunan desa, objek rekreasi yang diurus desa, pemandian umum yang diurus desa, hutan desa, tempat-tempat pemancingan di hutan, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan jalan desa.

2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali. Menurut Widjaja (2002: 69) mengartikan APBDes sebagai berikut: "Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan".

Maka sewajarnya Desa yang telah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena demikian semua pengeluaran dan pendapatan akan tercatat atau terdaftar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" adalah sebagai berikut :

- a. Bagian penerimaan terdiri atas: Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu, Pos pendapatan asli desa, pos bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga, pinjaman desa, Pos lain-lain pendapatan.
- b. Bagian pengeluaran rutin terdiri atas: pos belanja pegawai: Pos biaya belanja barang, pos biaya pemeliharaan, pos perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, pengeluaran tak terduga.
- c. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas: Pos prasarana Pemerintahan desa, pos prasarana produksi, pos prasarana perhubungan, POS prasarana pemasaran, Pos prasarana sosial, Pembangunan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Desa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri untuk setiap tahun menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) setelah mendapatkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pengelolaan anggaran

tersebut di atas dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya setelah berakhir tahun anggaran.

2.2 Kajian Sebelumnya

Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam Penelitian yang dilakukan oleh Amin Rahmanurrasjid tahun 2008 yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada yang ada di Indonesia pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap kekuasaan harus dipikirkan beban tanggungjawab bagi setiap penerima kekuasaan. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Rahmah pada tahun 2011 dengan judul “Faktor-faktor penyebab pemekaran desa” dengan studi kasus yang diangkat yaitu pemekaran desa induk Lhok Meulaboh yang terletak di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Merueah provinsi Aceh. Pemekaran ini menjadi tiga desa, yaitu

desa mekar menjadi ayu, desa kemang jaya dan desa induk dengan nama tetap lhok meulaboh. Dari penelitian ini Rahmah menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab pemekaran desa tersebut yaitu adanya keinginan pembangunan masyarakat yang lebih kuat, karena desa yang luar dengan manajemen yang tidak optimal menjadi salah satu faktor penyebab lambannya pembangunan masyarakat di desa lhokmeulaboh. Atas dasar ini, sehingga masyarakat dusun menginginkan adanya pemekaran wilayah, dengan demikian akan mempermudah pembangunan masyarakat di wilayah ini. Alasan lainnya juga ditemukan rahmah bahwa, adanya sikap yang tidak transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa di Desa Lhok Meulaboh. Dengan demikian, diperlukan pemekaran wilayah agar pengelolaan kebijakan publik dapat dilakukan secara transparan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widyanto (2001), dalam Tesisnya tentang Pelaksanaan demokratisasi Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Kauman iten Tulungagung berusaha mengangkat permasalahan Demokratisasi pemerintahan yang terjadi di desa, kemudian melihatnya sebagai penunjang dan penghambat dari proses demokratisasi tersebut ia mencoba mengetahui makna sebenarnya tentang demokratisasi pada pemerintahan desa. Penelitian Widyanto ini merupakan jenis penelitian kualitatif, ini menggunakan analisis data model interaktif milik Milles dan Sberman yang terdiri dari pengumpulan data, data reduksi, penyajian dan kesimpulan/verifikasi.

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukannya adalah: Demokratisasi adalah sebuah proses. Akselerasi dari proses tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang berupa potensi

dan pemahaman masyarakat. Indikasi dari proses demokratisasi pemerintahan di Desa Sidorejo adalah: Partisipasi pembuatan keputusan. Pada masa orde baru Kepala Desa selaku ketua LKMD dan LMD sangat dominan dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi warga desa mulai nampak setelah era reformasi. Kebebasan individu. Warga masyarakat sudah mulai berani mengkritisi berbagai hal yang terkait dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan beragama dan berserikat. Perlakuan pemerintah atas hak dan kepemilikan rakyat. Kebijakan pemaksaan penyewaan lahan, pungutan terhadap pemilik sawah gogolan, saat ini sudah mulai dituntut warga desa untuk diluruskan. Perhatian pemerintah desa atas pendidikan anak-anak desa cukup baik. Semangat kerjasama warga Desa Sidorejo terfasilitasi oleh pemerintah desa secara tepat. Penyediaan data administrasi dan potensi desa sudah lengkap. Pelayanan informasi dapat terlayani dengan baik. Masyarakat Desa Sidorejo masih menempatkan aparat desa sebagai pemimpin masyarakat karena statusnya sebagai pamong desa. Dalam proses awal pembentukan panitia pemilihan BPD, kepala Desa tidak melibatkan diri. Hal ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan pemerintah desa atas diberlakukannya UU Otonomi Daerah tahun 1999. Warga desa memaknai demokratisasi pemerintahan desa dengan menitik beratkan kepada tujuan dan cita-cita ideal dibentuknya masyarakat desa/yaitu keadaan yang tenang/aman, tidak ada hambatan dalam mencari nafkah.

Hambatan utama proses demokratisasi pemerintahan desa berupa hambatan kultural terjadi akibat tidak adanya akses perekonomian rakyat desa, hambatan kelembagaan akibat kekhawatiran aparat desa atas konsekuensi material

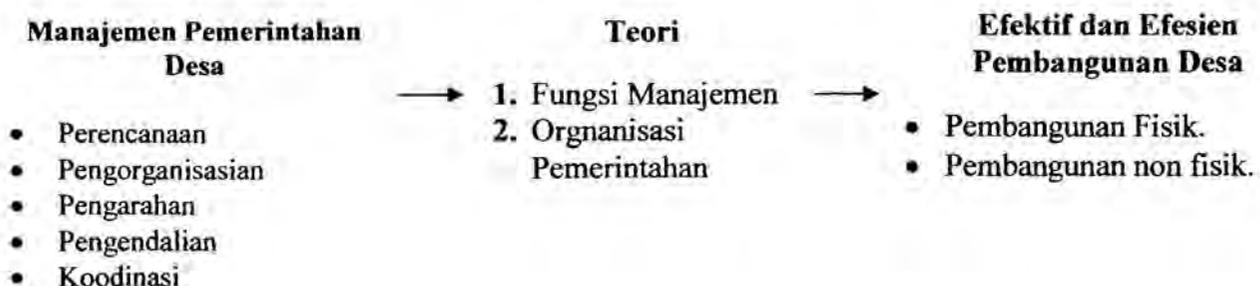
dari pemberlakuan UU Otonomi daerah/dan hambatan politis berupa keengganan pemerintah yang lebih atas, untuk melepas kekayaan desa yang selama ini dinikmatinya. Faktor penunjang demokratisasi pemerintahan desa adalah karakter Human Development Project dari warga desa/pola hidup sederhana serta banyaknya potensi ekonomi dan politik desa yang belum terkelola secara maksimal. Dari hasil penelitian tersebut, Widyanto menyimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah secara tidak dapat serta merta dilaksanakan pada awal tahun 2001. Masyarakat Desa membutuhkan untuk mempersiapkan diri. Komponen utama dari demokratisasi. Desa dapat dibentuk dari nilai-nilai serta norma-norma yang I masyarakat desa sendiri, seperti halnya kesederhanaan hidup, kekuatan jasmani dan rohani sebagai potensi kultural, kemauan aktif dalam perekonomian sebagai potensi ekonomi serta gairah dari warga untuk membangun desa. Selain itu, perlu adanya kesepakatan dalam hal tata krama (Fatsoen) politik yang dipatuhi oleh Desa baik Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta jajarannya maupun Badan Perwakilan Desa (BPD), untuk menghindari suasana kontra produksi dalam melaksanakan tugas.

Penelitian tentang implementasi konsep kebijakan ini memuat aspek-partisipasi, kebebasan individu, sikap pemerintah atas hak masyarakat, tiap aspeknya terdapat potensi kultural meliputi nilai, norma, pandangan hidup, ketabahan, kekuatan jasmani, rohani, dan potensi usaha yang terdiri dari motif inovasi ekonomi serta gairah partisipasi pembangunan desa. Temuan ini secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk penelitian lanjutan dan dapat disimpulkan bahwa nilai dan norma yang mengakar pada masyarakat merupakan

salah satu input yang bisa dijadikan faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

2.3 Kerangka Konseptual

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Hidayat (1986). Jadi fektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembangunan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan/berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternative yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah). Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik berupa infrastruktur bangunan fasilitas umum dan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat desa (Wresniwiro, 2007). Untuk itu maka tabel berikut ini merupakan penjabaran dari Efektifitas dan pembangunan adminitrasi di Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang sebagai tujuan dari pelaksanaan tugas pemerintah desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan menggunakan *mixed methods*, yaitu gabungan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif (Creswell, 2009: 6). Pendekatan kualitatif untuk menganalisis manajemen pengelolaan gampong kuta Ateuh. Pendekatan kuantitatif manajemen pengelolaan gampong kuta Ateuh dengan mereduksi variabel internal dan variabel eksternal dengan menggunakan analisis faktor melalui angket dengan beberapa responden. Penelitian yang mengintegrasikan kedua pendekatan (kualitatif dan kuantitatif) adalah *mixed methods* atau *multi method research design*. Glaser dan Strauss (dalam Moleong, 2007:38) menyatakan bahwa dalam banyak hal, kedua bentuk data (pendekatan kualitatif dan kuantitatif) tersebut diperlukan dimana satu pendekatan mendukung pendekatan yang lain, bukan kuantitatif menguji kualitatif, melainkan kedua bentuk tersebut digunakan bersama dan, apabila dibandingkan, masing-masing dapat digunakan untuk keperluan menyusun teori. Moleong (2007:8) menyatakan bahwa di dalam melakukan integrasi atau mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif memberikan fasilitas secara taktis dan memberikan akses yang mulus (*smooth*) serta memberikan hasil penelitian yang lebih baik (*superior*) dibandingkan dengan *single method*.

3.2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini yaitu sebanyak 9 orang berasal dari gampong Kuta Ateuh. Hal ini untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara *purposive*, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik *snowball*, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan yaitu sebanyak 9 orang.

3.3. Teknik Sampling

Penentuan sampel untuk informan menggunakan teknik *purposive sampling (non-probability sampling)* artinya ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan sebelumnya (Moleong, 2007: 27).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai Implementasi sistem administrasi di Gampong Kuta Ateuh dan kuta Ateuhr paska pemekaran.

2. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan.
3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian

3.5. Instrumen Penelitian

Penelitian tentang Kajian Implementasi fungsi manajemen Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status dari Kelurahan menjadi Gampong, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini menurut Poerwandari (1998) penulis sangat berperan dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendeteksi topik tersebut, mengumpulkan data, hingga analisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu :

1. Kuisisioner

Sejumlah pertanyaan yang menyangkut dengan manajemen pengelolaan gampong antara sesudah perubahan status dengan sebelum perubahan status. Kuisisioner ini akan diisi oleh responden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penelitian ini

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

4. Alat Perekam

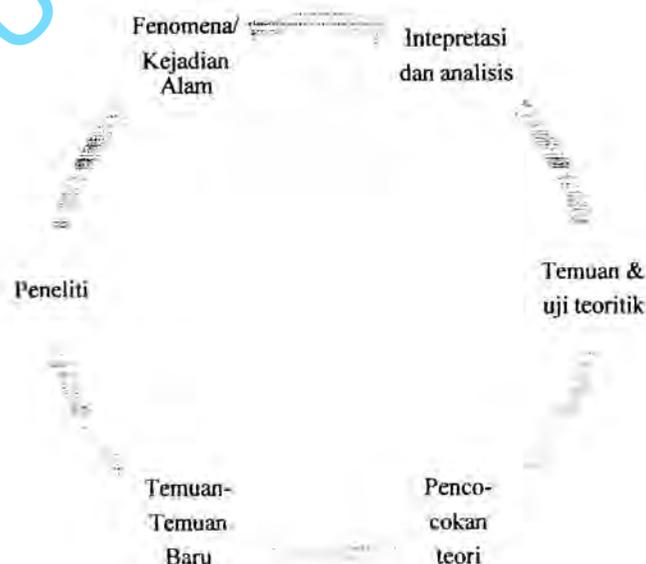
Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan didasarkan pada jenis data, dalam hal ini data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu; data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dan data kualitatif masing-masing dijelaskan sesuai dengan

format yang telah ada, artinya interpretasi atas data tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. dan kedua data itu saling memberikan gambaran atas masing-masing fokus. Menurut Patton dalam (Moleong, 2001:32) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih lanjut menurut Bungin (2001:290) analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif, strategi deskriptif kualitatif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi kualitatif. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data. Kemampuan analisis ini digambarkan mampu menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Berikut ini merupakan alur analisis data kualitatif menurut Bungin (2001:301):

Gambar 2.
Alur Analisis Data Kualitatif



Dalam hal ini menurut Hasan (2006: 24), pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

Universitas Terbuka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian

4.1.1. Profil Gampong Kuta Ateuh

Gampong Kuta Ateuh terletak di Pulau paling ujung Barat Indonesia yaitu Pulau Weh yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh dan merupakan 1 (satu) dari 18 (delapan belas) Gampong yang ada di Kota Sabang dan 1 (satu) dari 8 (delapan) Gampong di Kecamatan Sukakarya. Gampong ini terletak pada ketinggian 15 (lima belas) M di atas permukaan laut (dpl). Jarak dari Gampong Kuta Ateuh ke pusat Kecamatan Sukakarya 3 (tiga) Kilometer dan ke pusat Pemerintahan Kota Sabang adalah 1 (satu) Kilometer. Dengan Kondisi Geografis Gampong Kuta Ateuh yang terletak dipinggir laut dan berbukit sangat rawan bencana alam dimana sebahagian besar penduduknya tinggal di pinggir laut dan di lereng-lereng bukit dengan wilayah yang menjadi pusat perdagangan hasil pertanian, perikanan dan kebutuhan masyarakat lainnya di Kota Sabang sehingga telah padat oleh perumahan penduduk dan areal perdagangan, namun dengan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Batas Wilayah Gampong Kuta Ateuh Sabang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang (Bab II Bagian Kedua Pasal 19 ayat 1 dan 2). Adapun luas wilayah Gampong Kuta Ateuh yaitu 5 (lima) Kilometer Persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ie Meulee;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Kuta Timu;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Ie Meulee;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kuta Barat.

Cakupan wilayah Gampong Kuta Ateuh Sabang terdiri dari 5 (lima) Jurong, yaitu sebagai berikut: Jurong M. Thaib, Jurong Nawawi, Jurong Sutedjo, Jurong Habib Hasan, dan Jurong M. Nur Hasan. Adapaun dasar hukum penyusunan buku Profil Gampong Kuta Ateuh Sabang ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- f. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4857);
- g. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
- h. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 02);
- i. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 05);
- j. Qanun Gampong Kuta Ateuh Sabang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun 2011 Nomor 01);

- k. Peraturan Keuchik Gampong Kuta Ateuh Sabang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun Anggaran 2011 (Berita Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun 2011 Nomor 01).

Jumlah penduduk Gampong Kuta Ateuh Tahun 2011 adalah 4834 jiwa, terdiri atas: Laki-laki sebanyak: 2449 Jiwa, perempuan sebanyak: 2385 Jiwa, dan terdiri atas 1578 Kepala Keluarga (KK). Gampong Kuta Ateuh memiliki visi: mewujudkan Pemerintahan Gampong yang Profesional, Amanah, Transparan dan Bertanggungjawab untuk peningkatan Kualitas Pembangunan, Kesejahteraan serta Kemakmuran bagi Masyarakat yang berlandaskan Adat Istiadat dan Syariat Islam". Dan memiliki misi untuk:

1. Menjalankan Pemerintahan Gampong Bersih, Profesional dan Partisipatif;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat;
3. Pemberdayaan Perekonomian Gampong;
4. Menumbuh kembangkan nilai-nilai Kemanusiaan, Ikatan Sosial dan Solidaritas;
5. Memperkuat dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam berbagai bidang;
6. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Adat Istiadat dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari;
7. Pemberdayaan Generasi Muda melalui Organisasi-organisasi Kepemudaan dan Olah Raga;

8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin/Kurang mampu, Kecil dan Menengah serta Pemberdayaan Perempuan;

4.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Gampong

Perekonomian Gampong Kuta Ateuh sangat dipengaruhi oleh produksi bidang Perikanan dan Perdagangan. Hal ini menjadikan salah satu potensi unggulan Gampong dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah Nelayan/Perikanan dan Pedagang. Namun dengan potensi yang ada belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan dan kebutuhan hidup yang mencukupi diakibatkan kecilnya pendapatan dibandingkan tingginya harga-harga komoditi dipasaran. Maka untuk hal tersebut diatas dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pelatihan, bimbingan maupun Modal Usaha bagi masyarakat di Gampong Kuta Ateuh Sabang. Program Alokasi Dana Gampong (ADG) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Sabang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 merupakan salah-satu pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat ataupun pendukung program kerja pembangunan pada Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Sabang. Dengan ADG yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), maka sangat mendukung dalam upaya pembiayaan operasional bidang Administrasi, Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Gampong melalui perencanaan pembangunan yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Gampong yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Stake Holder yang ada di Gampong.

Melalui MUSRENBANG Gampong dapat dilaksanakan Arah dan Kebijakan Pembangunan Gampong yang dibiayai oleh APBG, ABPK, APBA dan APBN. Hasil MUSRENBANG Gampong dilaksanakan dengan menentukan Program-program pembangunan yang berdasarkan skala Prioritas sesuai dengan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Gampong. Adapun dalam pelaksanaannya MUSRENBANG Gampong untuk menentukan Program-program Rencana sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan Perencanaan penting untuk menentukan Arah dan Kebijakan Pembangunan Gampong selama 6 (enam) tahun kedepan yang dibiayai oleh APBG dengan memperhatikan komposisi 30% untuk Belanja Aparatur/Operasional Pemerintahan Gampong dan 70% Pembiayaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam beberapa perencanaan pembangunan menengah terdapat Program-program Prioritas yang memerlukan sumber pendanaan yang besar sehingga diperlukan pendanaan dari APBK, APBA dan APBN serta dana dari pihak lainnya. Dalam penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun 2011-2016 berpedoman pada Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 dengan kegiatan Rencana Pembangunan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor, Gedung, Balai, POSKAMLING dan Rumah Ibadah;
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Gampong dan Masyarakat;

- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dibidang Usaha Kecil dan Menengah, Nelayan serta Masyarakat Miskin/Kurang Mampu;
- d. Pengadaan barang Inventaris Kantor, Lembaga, Organisasi dan Jurong-jurong;
- e. Peningkatan dan pemberdayaan kegiatan-kegiatan keagamaan dan Adat Istiadat pada Gampong Kuta Ateuh Sabang;
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum;
- g. Peningkatan kegiatan Kesehatan Masyarakat, Sadar Lingkungan dan tanggap bencana bagi masyarakat;

Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG), Seperti halnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) yang merupakan salah-satu bentuk aspirasi masyarakat dalam pembangunan khususnya masyarakat di Gampong Kuta Ateuh Sabang, sehingga untuk mengimplementasikan RPJMG yang akan dijalankan oleh Pemerintahan Gampong perlu dituangkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) yang dilaksanakan pada tahun berjalan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) Tahun 2011 pada Gampong Kuta Ateuh Sabang yang kegiatannya dilaksanakan dan dibiayai oleh APBG Kuta Ateuh Sabang TA. 2011 yang telah disahkan oleh Tuha Peut Gampong Kuta Ateuh Sabang yang berpedoman pada Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan POSKAMLING pada Jurong Habib Hasan;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung TP-PKK Gampong dan Meunasah Babul Amin Jurong M. Thaib;
- c. Rehab Kantor Keuchik, Meunasah Nurul Huda Jurong M. Nur Hasan dan Balai Pengajian Jurong M. Thaib;
- d. Pengadaan barang Inventaris Kantor Keuchik, TP-PKK Gampong, Jurong-Jurong dan Meunasah Nurul Huda;
- e. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Balita dan MANULA pada Gampong Kuta Ateuh Sabang;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan, Adat Istiadat dan Kepemudaan pada Gampong Kuta Ateuh Sabang;

4.1.3. Kebijakan Umum Anggaran Gampong

Kebijakan Anggaran baik Belanja Aparatur, Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembiayaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sepenuhnya mengacu pada Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 dan kemampuan keuangan Gampong Kuta Ateuh Sabang dengan memperhatikan azas keadilan, pemerataan dan azas Skala Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam APBG, yang besarannya sangat bergantung pada Bantuan dan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Sabang. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengelolaan dan penggarapan Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang dapat memberikan nilai tambah dalam pembiayaan pembangunan. Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Gampong Kuta Ateuh

Sabang besaran bantuan Alokasi Dana Gampong dari Pemerintah Kota Sabang terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Sabang, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kota Sabang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat dana yang dikelola oleh Gampong Kuta Ateuh Sabang merupakan dana terbatas yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Gampong serta partisipasi masyarakat sepenuhnya, maka dituntut peran serta masyarakat secara luas dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pelaksanaan pembangunan dalam Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Sabang baik fisik maupun non-fisik untuk tahun 2011 cukup banyak kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, untuk itu diperlukan penjaringan dan pemilihan kegiatan pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan baik oleh APBG, APBK, APBA, APBN maupun dari sumber pendanaan lainnya. Prioritas gampong selalu dimusyawarahkan dalam MUSRENBANG Gampong di setiap awal tahun dan mengacu pada RPJM Gampong yang dituangkan dalam Berita Acara MUSRENBANG Gampong yang diketahui dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat, organisasi, kelompok dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Semua pelaksanaan pembangunan di Gampong Kuta Ateuh Sabang menggunakan ketentuan Skala Prioritas, Setelah pekerjaan fisik selesai kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik dan lain sebagainya

diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Gampong Kuta Ateuh Sabang.

4.1.4. Sosial Budaya

Sampai dengan saat ini belum ada Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Gampong Kuta Ateuh Sabang perihal Pelaksanaan dan Ketentuan-ketentuan Adat Istiadat yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Gampong Kuta Ateuh Sabang, namun selama ini ditengah-tengah masyarakat masih ada dan masih terjaganya norma-norma Adat Istiadat/Kebiasaan yang secara terus menerus digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan dan kegiatan masyarakat khususnya dibidang kegiatan Keagamaan. Kegiatan-kegiatan dalam rangka Penegakan Syariat Islam telah dilaksanakan masyarakat Gampong Kuta Ateuh Sabang salah satunya dengan kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam setiap tahunnya yang diisi dengan Dakwah, Penyuluhan dan Pembinaan bagi masyarakat Gampong.

Kerjasama dan Solidaritas masyarakat Gampong Kuta Ateuh selama ini cukup bagus hal ini ditunjukkan terutama dalam hal Gotong Royong dimana lebih dari separuh warga aktif melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan Gotong Royong ini telah menjadi Program tahunan Pemerintah Gampong Kuta Ateuh dan Pemerintah Daerah yang biasa disebut *Jum'at Bersih* karena dilaksanakan pada hari Jum'at setiap minggunya. Bukan hanya dalam bidang kegiatan Gotong Royong saja masyarakat Gampong Kuta Ateuh Aktif berpartisipasi namun dalam segala hal terutama yang bersifat kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan telah berjalan dan menjadi Adat/kebiasaan sejak dahulu.

Konflik yang terjadi berkaitan dengan berbagai masalah Sosial Kemasyarakatan selama ini telah diselesaikan dengan baik oleh pihak Aparatur Gampong dalam hal ini mulai dari Ulee Jurong, Keuchik hingga Lembaga Tuha Peut dengan Azas Adat, Agama, Musyawarah/Mufakat dan Kekeluargaan dengan dibantu oleh Pihak Kepolisian dan TNI melalui BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA Gampong Kuta Ateuh Sabang.

4.1.5. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan menata adat Gampong berlandaskan Syariat Islam. Untuk itu Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Kuta Ateuh dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) urusan/ bidang tersebut, yaitu:

- a) Bidang Pemerintahan, Pada Tahun 2011 Keuchik Gampong Kuta Ateuh Sabang telah mengeluarkan 1 (satu) buah Qanun Gampong, yaitu :
 “Qanun Gampong Kuta Ateuh Sabang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun Anggaran 2011” Peraturan Keuchik Gampong Kuta Ateuh Sabang yang telah dihasilkan 1 (satu) buah Peraturan Gampong, yaitu: “Peraturan Keuchik Gampong Kuta Ateuh Sabang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun Anggaran 2011” Keputusan Keuchik Gampong Kuta Ateuh Sabang telah

dikeluarkan sebanyak 30 (tiga puluh) Keputusan, yaitu antara lain Pembentukan Lembaga dan Kelompok dibidang Profesi, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

- b) Bidang Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun Anggaran 2011 yang disahkan melalui Qanun Gampong Kuta Ateuh Sabang Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 20 April 2011.
- c) Bidang Kemasyarakatan, Urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pembangunan yang dilaksanakan Tahun 2011 di Gampong Kuta Ateuh Sabang tidak hanya Fisik semata namun juga Non Fisik.

Masyarakat Gampong Kuta Ateuh Sabang berasal dari berbagai Etnis, Suku, Ras dan Agama yang selama ini hidup Rukun dan Damai, antara lain Suku Aceh, Jawa, Padang dan Etnis China dengan Mayoritas beragama Islam. Bahasa yang umumnya dipakai adalah Bahasa Aceh dan Bahasa Indonesia. Jumlah penduduk Gampong Kuta Ateuh berdasarkan hasil pendataan terakhir berjumlah 4834 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1578 KK. Pada Tahun 2009-2011 terjadi perpindahan penduduk yang cukup signifikan khususnya pada Jurong Perikanan, hal ini dipicu oleh Relokasi penduduk Korban Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami pada Tahun 2004 yang mendapatkan Bantuan Rumah dari Pemerintah dan Pihak Donatur lainnya. Mata pencaharian penduduk Gampong Kuta Ateuh yang dominan adalah Nelayan dan Perdagangan, hal ini dikarenakan Gampong Kuta Ateuh ada di pinggir pantai dan bagian dari pusat Perdagangan

Kota Sabang namun masih banyak masyarakat yang masih Kurang Mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk pengembangan Usahanya karena semakin mahalnya barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Kota Sabang dimana sebagian besar barang-barang kebutuhan tersebut masih di Impor dari luar Kota Sabang.

Tabel. 4.1.
Data penduduk Putus Sekolah Tahun 2011

Jurong	Putus sekolah						Ket.
	SD		SMP		SMA		
	9-12		13-15				
	L	P	L	P	L	P	
M. Thaib	-	-	-	-	-	2	Telah dilakukan pembinaan dan pelatihan oleh pihak terkait secara bertahap
Nawawi	-	-	1	-	3	-	
Sutedjo	2	-	-	-	2	-	
Habib Hasan	2	-	-	-	-	-	
M. Nur hasan	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	4		1		5	2	12

Sumber: Data lapangan olahan february 2014

Tabel di atas memperlihatkan tentang angka putus sekolah di Gampong Kuta Ateuh berdasarkan data tahun 2011. Bahwa angka putus sekolah sebanyak 4 orang dengan jenis kelamin laki-laki umur 9-12 tahun atau kita sebut dengan usia sekolah dasar (SD) telah putus sekolah, diketahui dua orang berasal dari dusun Sutedjo dan dua lainnya dari dusun Habib Hasan. Kategori putus sekolah usia sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak satu orang yang berasal dari dusun Nawawi, dan sedangkan pada umur Sekolah Menengah Atas (SMA) diketahui jumlah yang putus sekolah sebanyak 7 orang, dengan kategori 5 orang lelaki dan 2 orang lainnya perempuan. Tiga orang lelaki tersebut berasal dari dusun Nawawi

dan 2 orang lainnya berasal dari dusun Sutedjo, sedangkan sebanyak dua orang perempuan tersebut berasal dari dusun M. Thaib.

Tabel 4.2.
Data Penduduk Buta Aksara Tahun 2011

Jurong	Usia				Ket.
	15-44		45+		
	L	P	L	P	
M. Thaib	-	1	-	5	Telah dilakukan pembinaan dan pelatihan oleh pihak terkait secara bertahap
Nawawi	2	7	1	2	
Sutedjo	-	-	1	5	
Habib Hasan	-	-	-	4	
M. Nur hasan	-	-	-	-	
Jumlah	2	8	2	17	29

Sumber: Data lapangan olahan february 2014

Tabel 4.2. di atas memperlihatkan tentang penduduk buta aksara, berdasarkan tersebut diketahui bahwa penduduk buta aksara di Gampong Kuta Ateuh sebanyak 29 orang, dua orang diantaranya berusia 15-44 tahun dengan jenis kelamin laki-laki yang keduanya berasal dari dusun Nawawi, kemudian 1 orang berjenis kelamin perempuan berasal dari dusun M. Thaib dan 7 orang perempuan lainnya berasal dari dusun Nawawi yang kesemua mereka berumur antara 15-44 tahun. Selanjutnya kategori buta aksara diatas umur 45 tahun diketahui berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang, 1 orang berasal dari dusun Nawawi, sedangkan 1 orang lainnya berasal dari dusun Sutedjo, kemudian diketahui jenis kelamin yang buta aksara di atas umur 45 yaitu berasal dari dusun M. Thaib sebanyak 5 orang, dusun Nawawi 2 orang, dari dusun Sutedjo sebanyak 5 orang dan dari dusun Habib Hasan sebanyak 4 orang. dari tabel di atas, diketahui bahwa angka buta aksara paling banyak adalah berjenis kelamin perempuan.

Tabel.4.3
Data Penduduk Penyandang Cacat Tahun 2011

Jurong	Kategori			Ket.
	Ringan	Sedang	Berat	
M. Thaib	4	2	-	Telah mendapat bantuan sosial setiap tahunnya
Nawawi	3	4	-	
Sutedjo	5	5	-	
Habib Hasan	1	5	1	
M. Nur hasan	2	1	1	
Jumlah	15	13	2	30

Sumber: Data lapangan olahan february 2014

Tabel di atas memperlihatkan tentang data penduduk penyandang cacat berjumlah 30 orang, yang terdiri dari tiga kategori, yaitu kategori ringan, sedang dan kategori berat. Kategori berat sebanyak 2 orang diketahui 4 orang diantaranya berasal dari dusun M. Thaib, 3 orang berasal dari dusun Nawawi, 5 orang dari dusun Sutedjo, 1 orang berasal dari dusun Habib Hasan dan dua orang lainnya berasal dari dusun M. Nur Hasan. Kemudian untuk kategori cacat sedang berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 2 orang dari dusun M. Thaib, 4 orang dari dusun Nawawi dan 5 orang dari dusun Sutedjo serta 5 orang juga berasal dari dusun Habib Hasan serta hanya 1 orang berasal dari dusun M. Nur Hasan. Untuk cacat kategori berat hanya dua orang, masing-masing dari dusun Habib Hasan dan dusun M. Nur Hasan.

Tabel. 4.4
Data Anak Yatim Gampong Kuta Ateuh Sabang Tahun 2011

Jurong	Jumlah	Ket.
M. Thaib	6	Telah mendapat bantuan sosial setiap tahunnya
Nawawi	3	
Sutedjo	8	
Habib Hasan	8	
M. Nur hasan	17	
Jumlah	42 orang	

Sumber: Data lapangan olahan february 2014

Tabel 4.4. di atas memperlihatkan tentang data anak yatim yang ada di gampong Kuta Ateuh menurut data tahun 2011. Dapat diketahui bahwa 6 orang berasal dari dusun M. Thaib, 3 orang berasal dari dusun Nawawi, sebanyak 8 orang berasal dari dusun Sutedjo, 8 orang lainnya berasal dari dusun Habib Hasan dan yang paling banyak yaitu dari dusun M. Nur Hasan sebanyak 17 orang anak yatim.

Tabel di atas menunjukkan bahwa gampong Kuta Ateuh merupakan gampong yang juga terdapat masyarakat kurang upaya, dalam hal ini seperti cacat, atau fakir miskin dengan keterbatasan tertentu, oleh karena itu, gampong kuta Ateuh juga merupakan salah satu gampong penerima bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah Kota Sabang dan juga pemerintah Provinsi Aceh sendiri. Atas dasar kondisi ini, pemerintah memberikan perhatian kepada gampong kuta Ateuh melalui bantuan-bantuan tertentu yang disampaikan melalui pemerintahan desa, sebab pemerintahan desa lebih memahami karakteristik masyarakatnya, oleh karena itulah pemerintah pusat maupun pemerintah Kota dan juga provinsi menganut sistem kerjasama dengan pemerintahan gampong.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian terhadap kajian implementasi fungsi manajemen gampong kuta Ateuh setelah perubahan status dari kelurahan menjadi gampong, didasarkan pada tiga fokus utama sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian ini. Penyajian data berikut ini dilakukan melalui proses wawancara atas item-item yang menjadi pertanyaan dan juga merupakan pecahan dari rumusan masalah.

Walaupun penelitian ini menggunakan instrumen wawancara, namun juga akan ditampilkan tabel kecedrungan responden dalam memberikan tanggapan mereka menyangkut dengan manajemen pemerintahan desa setelah perubahan status dari kelurahan menjadi gampong. Berikut hasil wawancaranya:

4.2.1. Sistem Manajemen di Gampong Kuta Ateuh Setelah Perubahan Status Kelurahan Menjadi Gampong

1. Manajemen Perencanaan di Gampog Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong

Bicara perencanaan, merupakan sesuatu yang sangat utama dalam suatu pelaksanaan pemerintahan, baik dalam skala besar, menengah maupun kecil. Perencanaan yang baik sebagai suatu barometer bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan itu baik dan normal. Dan jika perencanaan itu dapat diterapkan secara benar, maka akan menjadikan tolak ukur keberhasilan pemerintahan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, peneliti telah menghimpun hasil wawancara dengan responden di Kuta Ateuh, dalam hal ini Keuchik Kuta Ateuh..... (56th) mengatakan bahwa:

“ ...yang kami lakukan adalah sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang dan juga yang dibutuhkan masyarakat. Maka perencanaan yang kita buat berdasarkan pada aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang diinginkan masyarakat setempat, kita membangun ini bukan untuk pribadi kita, akan tetapi pembangunan yang kita mulai dengan perencanaan ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat banyak” (wawancara, Januari 2014)

Pentingnya perencanaan tidak dapat dinafikan, sebagai mana yang disampaikan oleh pak Keuchik Gampong Kuta Ateuh, bahwa tolak ukur utama

suatu pemerintahan itu adalah adanya perencanaan yang baik. Berkaitan dengan hal ini, responden Ali (38th) menjelaskan bahwa:

“.....tiada suatu pembangunan yang dilakukan tanpa ada perencanaan yang baik, oleh karena itu, seorang mpimpinan harus melakukan perencanaan dengan sematang mungkin, hal demikian akan menimbulkan dampak positif bagi suatu pemerintahan di Kuta Ateuh” (wawancara Januari 204)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, masyarakat di Gampong Kuta Ateuh memprioritaskan perencanaan sebagai langkah awal dalam suatu pembangunan yang adil dan merata. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan pernyataan umum, atas perencanaan, bukan pernyataan terhadap situasi sebelum perubahan status Gampong dan setelah perubahan status Gampong. Bicara perencanaan sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, dapat kita lihat dari sikap responden menyangkut dengan perencanaan sebelum perubahan status dengan perencanaan setelah perubahan status, sebagaimana yang terlihat dalam tabel 4.1. penjelasan berikut ini didasarkan pada kecedrungan sikap dari responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis. Kemudian juga akan dijelaskan akan dijelaskan berdasarkan item pertanyaan masing-masing.

Tabel 4.1
Perencanaan Manajemen di Gampong Ateuh setelah perubahan status kelurahan
menjadi gampong

No	Pernyataan Responden Penelitian	Setelah Perubahan Status						Sebelum Perubahan Status					
		Tidak		Cukup		Baik		Tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
1	Perencanaan (Planning)												
1.1	metode identifikasi masalah untuk perencanaan	22,2 %	2	77,8 %	7	100 %	0	11,1 %	1	77,8 %	7	11,1 %	1
1.2	teknik perumusan agenda perencanaan	11,1 %	1	88,9 %	8	100 %	0	0 %	0	77,8 %	7	22,2 %	2
1.3	materi perencanaan	22,2 %	2	55,6 %	5	22,2 %	2	11,1 %	1	55,6 %	5	33,3 %	3
1.4	keterlibatan publik dalam penyusunan rencana	22,2 %	2	44,4 %	4	33,3 %	3	11,1 %	1	77,8 %	7	11,1 %	1

Sumber: Data lapangan olahan februari 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa metode dalam perencanaan yang dilakukan sebelum perubahan status termasuk dalam kategori cukup, bukan jelek dan bukan juga bagus. Dimana sebanyak 77,8 % responden mengatakan cukup. sama juga seperti setelah adanya perubahan status, masyarakat pada umumnya memiliki pendapat yang sama, dimana metode dalam perencanaan yang diterapkan dalam pemerintahan sebelum perubahan status dan setelah perubahan status, dimana angka persentase juga sebanyak 77,88 persen, sama seperti sebelum perubahan status.

Bicara manajemen merupakan sesuatu yang sangat utama dalam suatu pelaksanaan pemerintahan, baik dalam skala besar, menengah maupun kecil. Perencanaan yang baik sebagai suatu barometer bahwa kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan itu baik dan normal. Dan jika perencanaan itu dapat diterapkan secara benar, maka akan menjadikan tolak ukur keberhasilan pemerintahan tersebut. Hal ini seperti yang diutarakan Griffin dalam Jeliteng (2012) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Dengan kata lain efektif menyangkut tujuan dan efisien menyangkut cara dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut.

Lebih lanjut Griffin dalam Jeliteng (2012) dijelaskan tentang konsep tersebut, sebagai berikut:

1. Fungsi perencanaan (*Planning*) adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.
2. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.
3. Fungsi pengarahan (*Directing/Leading*) Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
4. Fungsi pengendalian (*Controlling*) adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masyarakat di Gampong Kuta Ateuh memprioritaskan perencanaan sebagai langkah awal dalam suatu pembangunan yang adil dan merata. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan pernyataan umum, atas perencanaan, bukan pernyataan terhadap situasi sebelum perubahan status Gampong dan setelah perubahan status Gampong. Bicara perencanaan sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, dapat kita lihat dari sikap responden menyangkut dengan perencanaan sebelum perubahan status dengan perencanaan setelah perubahan status.

Dalam hal ini fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah kesepakatan tentang sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi secara proposional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasibuan (2004:43), Ada beberapa keuntungan dalam perencanaan yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan tujuan jelas, obyektif dan rasional.
2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan ekonomis.
3. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan semua fasilitas yang dimiliki.
4. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat.
5. Perencanaan dapat memperkecil resiko.
6. Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian.
7. Perencanaan merangsang prestasi kerja.
8. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap.

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa metode dalam perencanaan yang dilakukan sebelum perubahan status termasuk dalam kategori cuku, bukan jelek dan buka juga bagus. Manajemen pengorganisasian yang

selama ini diimplementasikan di Gampong Kuta Ateuh pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip manajemen. Pengorganisasian manajemen merupakan hal yang sangat mendasar dalam pemerintahan desa karena tidak dapat lepas dari keadaan admistrasi suatu desa, menurus keuangan desa, memantau kualitas kinerja pegawai desa, hubungan antara pegawai desa dengan masyarakat desanya dan membuat aturan-atauran desa yang sesuai dengan peraturan undang-undang.

2. Manajemen pengorganisasian di gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong.

Manajemen pengorganisasian yang selama ini diimplementasikan di Gampong Ateh pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip manajemen. Pengorganisasian manajemen merupakan hal yang sangat mendasar dalam pemerintahan desa karena tidak dapat lepas dari keadaan admistrasi suatu desa, menurus keuangan desa, memantau kualitas kinerja pegawai desa, hubungan antara pegawai desa dengan masyarakat desanya dan membuat aturan-atauran desa yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Hasil wawancara dengan responden, Bukhari (48th) yang dalam kesehariannya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mengatakan bahwa:

“Pengorganisasian manajemen setelah perubahan status dari kelurahan menjadi gampong pada prinsipnya tidak berubah secara mendasar, hal ini dikarenakan gampong Kuta Ateuh secara berkesinambungan dalam pekerjaan sudah cukup baik. Contoh dikalangan pegawai desa saling mempunyai hubungan/ koordinasi pada saat gampong Ateuh merencanakan suatu kegiatan”. (wawancara, Januari 2014).

Pengorganisasian manajemen merupakan unsur yang sangat penting terutama pada praktek manajemen pemerintahan desa. Karena tanpa adanya pengorganisasian, dapat dikatakan akan menghambat perencanaan suatu kegiatan.

Berkaitan dengan hal ini responden Mukhtaruddin (58th) salah seorang Tuha Peut di gampong Kuta Ateuh memberikan tanggapannya bahwa:

“... pengorganisasian manajemen di gampong Kuta Ateuh terutama sikap pegawainya dalam melakukan koordinasi dengan Tuha Peut pada saat merencanakan suatu kegiatan atau ketika ada masalah – masalah dari internal maupun dari eksternal desa, pada pegawai tersebut sudah terorganisasi dengan baik” (wawancara, Januari 2014)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengorganisasin manajemen yang terdapat di gampong Kuta Ateuh sudah terlaksana dengan baik baik, dimana para pegawai sudah terorganisasi dalam hal administrasi maupun dalam berkoordinasi ketika akan ada perencanaan untuk membuat suatu kegiatan pembangunan maupaun kegiatan gampong lainnya. Hasil penelitian secara umum berkaitan dengan manajemen pengorganisasian di gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status dari kelurahan menjadi desa dapat diketahui pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pengorganisasian Manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		Tidak		Cukup		Baik		Tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
2	Pengorganisasian (Organizing)												
2.1	Bagaimanakah keadaan administrasi												
	a pengurusan surat menyurat	33,3%	3	66,7%	6	,0%	0	22,2%	2	66,7%	6	11,1%	1
	b pembuatan qanun gampong	22,2%	2	55,6%	5	22,2%	2	11,1%	1	88,9%	8	,0%	0
	c keuangan desa	22,2%	2	33,3%	3	44,4%	4	11,1%	1	66,7%	6	22,2%	2

2.2	Bagaimana keadaan pegawai												
a	kualitas pegawai	11,1%	1	66,7%	6	22,2%	2	,0%	0	44,4%	4	55,6%	5
b	tingkat kedisiplinan pegawai	11,1%	1	77,8%	7	11,1%	1	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3
2.3	Bagaimana sikap pegawai												
a	hubungan kerja	22,2%	2	66,7%	6	11,1%	1	11,1%	1	66,7%	6	22,2%	2
b	koordinasi dalam bagan organisasi	22,2%	2	44,4%	4	33,3%	3	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3
2.4	Hubungan internal												
a	lembaga tuha peut dengan keuchik	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3	,0%	0	88,9%	8	11,1%	1
b	keuchik dengan perangkat desa	11,1%	1	66,7%	6	22,2%	2	11,1%	1	88,9%	8		0
c	keuchik dengan masyarakat	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3	,0%	0	77,8%	7	22,2%	2
2.5	Hubungan eksternal kelurahan												
a	hubungan ditingkat pemerintahan lebih tinggi	0%	0	44,4%	4	55,6%	5	,0%	0	44,4%	4	55,6%	5
b	hubungan antar desa lainnya	0%	0	33,3%	3	66,7%	6	,0%	0	33,3%	3	66,7%	6

Tabel 4.2 menunjukkan secara umum dari 9 responden yang memberikan

pernyataan atau mengisi kuisioner dapat diketahui bahwa 6 orang responden dengan persentase 66,7 persen menyatakan setelah adanya perubahan status dari kelurahan menjadi gampong ada terjadi peningkatan tertama pada kualitas pegawainya. Sedangkan hasil penelitian terhadap 9 pernyataan yang diberikan

reponden pada hubungan antar desa lainnya tidak terjadi perubahan baik sebelum maupun setelah terjadi perubahan status dari kelurahan menjadi gampong. Artinya sebanyak 6 orang dengan persentase 66,7 persen menyatakan hubungan antar desa sudah terorganisasi dengan baik, sedangkan 3 responden lainnya dengan persentase 33,3 persen menyatakan cukup.

Pengorganisasian manajemen merupakan unsur yang sangat penting terutama pada praktek manajemen pemerintahan desa. Karena tanpa adanya pengorganisasian, dapat dikatakan akan menghambat perencanaan suatu kegiatan.

Sejalan dengan pemerintahan tersebut Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir (2006:15) menyatakan bahwa:

“Desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administrative memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari Negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya”.

Pengorganisasian dengan organisasi adalah hasil dari pengorganisasian yaitu apabila organisasi baik, maka organisasi pun akan baik dan tujuan pun relatif mudah dicapai. Organisasi ini terdiri dari dua bagian dasar yaitu: Bagian-bagian/departemen/devisi, dan Hubungan-hubungan, yakni hubungan antar manusia, antar departemen yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas. Penetapan hubungan-hubungan ini merupakan salah satu syarat tercapainya kerja sama (*Team work*) antara pegawai. Pengorganisasian menurut Hasibuan (2004; 45) sebagai berikut :

“pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif

didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktifitas tersebut”

Berdasarkan pendapat diatas, pengorganisasian adalah kelompok orang yang bekerja sama, dengan adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, serta adanya pendelegasian wewenang, dalam hal ini menurut Hasibuan (2004; 47) bahwa.

“Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kegiatan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan”

Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi pengorganisasian ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang. Pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksaniakan oleh unit-unit organisasi seperti pendelegasian wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan informasi vertikal dan horizontal, dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien.

3. Manajemen Pengarahan di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong.

Berbicara manajemen pengarahan ditingkatan pemerintahan desa erat kaitannya dengan pemimpin desa yang mampu memotivasi kinerja bawahannya dalam mengarahkan target perencanaan pelaksanaan program desa, bidang pelayanan administrasi kepada masyarakat, mengarahkan bawahannya dalam menjalin hubungan intenal eksternal serta pengarahan dalam penyelesaian konflik dalam desa maupun konflik antar desa.

Manajemen pengarahannya merupakan bagian terpenting dalam memimpin suatu lembaga, karena bicara pengarahannya berarti bagaimana memimpin bawahan untuk siap bekerja sesuai dengan keinginan pemimpin dalam mencapai tujuan suatu lembaga. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuchik kuta Ateuh yang memberikan komentarnya bahwa:

“...Sebagai seorang keuchik di gampong Kuta Ateuh, sudah menjadi tugas dan kewajiban saya untuk memberikan pengarahannya kepada bawahan saya untuk menjalankan program terutama program pembangunan gampong sesuai dengan prosedur yang diberikan pemerintah dan perencanaan pembangunan yang mesti dikerjakan sesuai target. Apabila dalam pengerjaan program gampong, terdapat bawahan yang kurang bersemangat menyelesaikan pekerjaan dikarenakan ada kendala-kendala yang terjadi dilapangan, adalah juga tugas saya sebagai Kuchik untuk memberikan motivasi kepada bawahan maupun masyarakat untuk mengevaluasi kendala-kendala yang terjadi. Dengan memberikan motivasi penyelesaian kendala-kendala yang menghambat pembangunan program desa kepada bawahan, maka dengan sendirinya bawahan ataupun pekerja tersebut akan termotivasi untuk menyelesaikan program pembangunan desa sesuai dengan target. (Wawancara, Januari 2014)

Dari komentar yang disampaikan oleh Keuchik gampong Kuta Ateuh menunjukkan bahwa peran keuchik di gampong sebagai pemimpin desa memiliki tugas dan kewajiban untuk mengarahkan aparatur desanya dalam mendorong program pembangunan desa, serta hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah ketika bawahan mengalami kendala-kendala lapangan yang dapat menghambat tercapainya program pembangunan desa di gampong kuta Ateuh.

Dari pendapat yang disampaikan oleh responden dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pegawai memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja terhadap program pembangunan di gampong Kuta Ateuh. Peranan ini adalah memotivasi untuk bekerja sama dalam program-program pembangunan gampong, mengarahkan pelayanan administrasi yang baik kepada

warga desa, mengarahkan hubungan internal eksternal dan mengarahkan bawahan maupun warga dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi didesanya. Untuk mengetahui pendapat umum responden terhadap manajemen pengarahan yang terdapat di Gampong Kuta Ateuh dapat dilihat pada tabel 4.3 Berikut:

Tabel 4.3
Manajemen Pengarahan di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong

No	Pernyataan Responden Penelitian	Setelah Perubahan Status						Sebelum Perubahan Status					
		Tidak		Cukup		Baik		Tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
3	Pengarahan (Leading)												
3.1	pengarahan motivasi dan kerja sama	,0%	0	44,4%	4	55,6%	5	,0%	0	33,3%	3	66,7%	6
3.2	pengarahan target pencapaian program	,0%	0	77,8%	7	22,2%	2	,0%	0	55,6%	5	44,4%	4
3.3	pengarahan bidang pelayanan administrasi	,0%	0	33,3%	3	66,7%	6	,0%	0	22,2%	2	77,8%	7
3.4	pengarahan bidang hubungan internal	,0%	0	88,9%	8	11,1%	1	,0%	0	77,8%	7	22,2%	2
3.5	pengarahan hubungan eksternal	,0%	0	88,9%	8	11,1%	1	,0%	0	77,8%	7	22,2%	2
3.6	pengarahan penyelesaian konflik	,0%	0	44,4%	4	55,6%	5	,0%	0	33,3%	3	66,7%	6

Sumber: Data lapangan olahan februari 2014

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa dari 9 reponden yang mengisi kusioner penelitian pada umumnya sebanyak 7 responden dengan persentase 77,8 persen menyatakan pengarahannya target pencapaian program di gampong Kuta Ateuh sudah cukup baik. Sedangkan di bidang pengarahannya penyelesaian konflik sebanyak 5 reponden dengan persentase 55,6 persen menyatakan sudah baik. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis penting untuk meningkatkan lagi beberapa bidang lain terkait dengan manajemen pengarahannya agar kedepan lebih baik dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Berbicara manajemen pengarahannya ditingkatkan pemerintahan desa erat kaitannya dengan pemimpin desa yang mampu memotivasi kinerja bawahannya dalam mengarahkan target perencanaan pelaksanaan program desa, bidang pelayanan administrasi kepada masyarakat, mengarahkan bawahannya dalam menjalin hubungan internal eksternal serta pengarahannya dalam penyelesaian konflik dalam desa maupun konflik antar desa.

Manajemen pengarahannya merupakan bagian terpenting dalam memimpin suatu lembaga, karena bicara pengarahannya berarti bagaimana memimpin bawahan untuk siap bekerja sesuai dengan keinginan pemimpin dalam mencapai tujuan suatu lembaga. Peran keuchik di gampong sebagai pemimpin desa memiliki tugas dan kewajiban untuk mengarahkan aparatur desanya dalam mendorong program pembangunan desa, serta hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah ketika bawahan mengalami kendala-kendala lapangan yang dapat menghambat tercapainya program pembangunan desa di gampong kuta Ateuh.

Belum lagi ketika suatu desa terdapat konflik, sudah tentu kepala desa memiliki peran yang sangat besar untuk dapat menyelesaikan konflik warganya maupun konflik yang terjadi antara desa yang dipimpinnya dengan desa tetangganya. Peranan ini adalah memotivasi untuk bekerja sama dalam program-program pembangunan gampong, mengarahkan pelayanan administrasi yang baik kepada warga desa, mengarahkan hubungan internal eksternal dan mengarahkan bawahan maupun warga dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi didesanya.

4. Koordinasi Manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong

Melakukan koordinasi pada suatu lembaga pemerintahan merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan manajemen organisasi. Karena tanpa adanya koordinasi maka akan sangat sulit membangun maupun mengembangkan organisasi yang besar. Apalagi jika kita mengaitkannya dengan pemerintahan desa, sangat perlu bagi seorang keuchik untuk berkoordinasi dengan bawahannya, begitu juga sebaliknya sangat perlu bawahan berkoordinasi dengan keuchik, baik dalam mengkoordinasikan suatu program pembangunan maupun dalam hal penyelesaian masalah-masalah. Sesuai dengan gambaran di atas, Abdul Muthalib (44th) memberikan pendapatnya bahwa:

“...menyoal koordinasi yang terdapat pada gampong Kuta Ateuh, pada saat koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi antara keuchik dengan pegawai kantornya, begitupun dengan pegawai bawahannya yang saling berkoordinasi dengan atasannya. Koordinasi ini berkaitan erat secara berkesinambungan, karena di desa Kuta Ateuh hampir setiap harinya banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintahan desa maupun warga desa ini sendiri. Selain itu juga koordinasi dilakukan dengan desa lainya dalam bentuk silaurrahi maupun kerja sama antar desa terkait dengan pencapaian program pembangunan gampong atau

ada kegiatan lainnya yang saling membutuhkan kerja sama antar sesama warga gampong”.

Dari pendapat yang disampaikan oleh responden diatas menunjukkan bahwa manajemen koordinasi yang terdapat di pemerintahan gampong Kuta Ateuh telah membawa dampak positif dalam aspek pembangunan desa. Hal ini karena koordinasi yang dilakukan oleh atasan/keuchik terhadap bawahan/pegawai dan demikian juga sebaliknya merupakan bentuk bahwa pemerintahan gampong kuta Ateuh sebelum perubahan status pada telah mengenal manajemen koordinasi. Untuk mengetahui pendapat umum terkait dengan koordinasi manajemen di gampong Kuta Ateuh setelah terjadi perubahan status dari kelurahan menjadi gampong dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Koordinasi Manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah
perubahan status kelurahan menjadi gampong

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		Tidak		Cukup		Baik		Tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
4	Koordinasi (Coordinating)												
4.1	koordinasi dengan bawahan	11,1%	1	11,1%	1	77,8%	7	,0%	0	33,3%	3	66,7%	6
4.2	koordinasi dengan atasan	11,1%	1	22,2%	2	66,7%	6	,0%	0	44,4%	4	55,6%	5
4.3	koordinasi dalam desa	,0%	0	44,4%	4	55,6%	5	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3
4.4	koordinasi dengan luar desa	,0%	0	33,3%	3	66,7%	6	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3

Sumber: Data lapangan olahan februari 2014

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dari 9 responden yang mengisi kuisioner penelitian diketahui 7 responden dengan persentase 77,8 persen menyatakan koordinasi dengan bawahan sudah baik, sedangkan 6 responden dengan persentase 66,7 persen menyatakan bahwa koordinasi antara bawahan dengan atasan sudah baik. Dengan demikian manajemen koordinasi yang terdapat di gampong Kuta Ateuh sudah baik, karena itu penting untuk dipertahankan dan terus dikembangkan agar lebih baik lagi demi terlaksananya program pembangunan gampong sesuai pencapaian target yang telah direncanakan.

Melakukan koordinasi pada suatu lembaga pemerintahan merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan manajemen organisasi. Karena tanpa adanya koordinasi maka akan sangat sulit membangun maupun mengembangkan organisasi yang besar. Apalagi jika kita mengaitkannya dengan pemerintahan desa, sangat perlu bagi seorang keuchik untuk berkoordinasi dengan bawahannya, begitu juga sebaliknya sangat perlu bawahan berkoordinasi dengan keuchik, baik dalam mengkoordinasikan suatu program pembangunan maupun dalam hal penyelesaian masalah-masalah

5. Pengendalian Manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong

Aspek manajemen selanjutnya yang sangat penting dalam pelaksanaan roda organisasi adalah pengendalian. Pengendalian merupakan aspek memantau dalam mengendalikan suatu organisasi agar apa yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dikoodinasikan dapat terarah sesuai dengan pencapaian target yang direncanakan. Tanpa adanya pengendalian manajemen maka

memungkinkan semua yang telah dilaksanakan akan gagal karena tidak adanya kontrol yang baik dari seorang pemimpin maupun anggota yang dipimpinnya.

Paparan wawancara dengan Keuchik Kuta Ateuh, ia memberikan komentarnya sebagai berikut:

“ pengendalian atau pelaksanaan kontrol dalam berbagai aspek pelaksanaan manajemen pemerintahan di gampong Kuta Ateuh, pada prinsipnya di kendalakan secara bersama-sama yang melibatkan Tuha Peut, Keuchik, Pegawai desa bersama-sama warga desa. Dengan metode pengendalian yang demikian akan memudahkan pelaksanaan program, serta memudahkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat pencapaian program. Namun kontrol terhadap manajemen ini sebenarnya juga untuk meminimalisir beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti kontrol terhadap pegawai yang enggan bekerja, kontrol terhadap kas keuangan gampong serta kontrol terhadap pemanfaatan sarana gampong agar tidak disalah manfaatkan. Sehingga dengan adanya pengendalian akan memberikan suatu konsekuensi yang baik dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan di gampong Kuta Ateuh. (wawancara , Januari 2014)

Dari pendapat yang disampaikan oleh Keuchik Kuta Ateuh menunjukkan bahwa pengendalian pada intinya adalah untuk mengontrol beberapa aspek pelaksanaan manajemen desa terkait dengan keadaan organisasi desa, pegawai desa, keuangan dan sarana desa. Berkaitan dengan hal diatas Mukhtaruddin juga menyampaikan bahwa:

“Fungsi pengendalian adalah mengontrol pemerintahan desa agar pemerintahan desa terlaksana sesuai dengan aturan serta prosedur yang berlaku. Kontrol ini juga untuk menekan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa”. (Wawancara, januari 2014).

Dari dua pendapat yang disampaikan oleh responden berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian manajemen di gampong Kuta Ateuh dapat penulis simpulkan bahwa pengendalian adalah mengontrol terlaksananya suatu program agar terkendali sesuai aturan yang telah direncanakan, agar program tersebut dapat tercapat tepat waktu. Selain itu, pengendalian memegang peranan yang sangat

penting seperti yang terdapat di gampong Kuta Ateuh bahwasannya kontrol dipegang oleh Tuha Peut, Keuchik dan Pegawai gampong yang juga melibatkan warga pada prinsipnya adalah bentuk kerja sama dalam meminimalisir kelemahan- kelemahan yang dapat menghambat tercapainya pelaksanaan program. Untuk mengetahui fungsi pengendalian manajemen berdasarkan hasil penelitian responden di gampong Kuta Ateuh dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pengendalian Manajemen di Gampong Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong

No	Pernyataan Responden Penelitian	Setelah Perubahan Status						Sebelum Perubahan Status					
		Tidak		Cukup		Baik		Tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
5	Pengendalian												
5.1	pengendalian organisasi		0	22,2%	2	77,8%	7		0	22,2%	2	77,8%	7
5.2	pengendalian pegawai		0	55,6%	5	44,4%	4		0	44,4%	4	55,6%	5
5.3	pengendalian keuangan		0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3
5.4	pengendalian sarana		0	77,8%	7	22,2%	2	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3

Sumber: Data lapangan olahan februari 2014

Dari hasil pengisian kuisioner sesuai dengan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa dari 9 orang responden yang memberikan pernyataan terhadap fungsi pengendalian manajemen di gampong Kuta Ateuh menunjukkan 7 responden dengan persentase 77,8 persen menyatakan pengendalian organisasi sudah baik setelah perubahan status dari kelurahan menjadi gampong maupun sebelum terjadi perubahan status. Sedangkan secara umum pada fungsi

pengendalian pegawai, dan sarana sudah cukup baik. Dengan demikian untuk fungsi pengendalian pegawai, keuangan dan sarana agar dapat ditingkat ke arah yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan gampong di Kuta Ateuh

Pengendalian merupakan aspek memantau dalam mengendalikan suatu organisasi agar apa yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dikoodinasikan dapat terarah sesuai dengan pencapaian target yang direncanakan. Tanpa adanya pengendalian manajemen maka memungkinkan semua yang telah dilaksanakan akan gagal karena tidak adanya kontrol yang baik dari seorang pemimpin maupun anggota yang dipimpinya.

Pendapat yang disampaikan oleh responden berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian manajemen di gampong Kuta Ateuh dapat penulis simpulkan bahwa pengendalian adalah mengontrol terlaksananya suatu program agar terkendali sesuai aturan yang telah direncanakan, agar program tersebut dapat tercapat tepat waktu. Selain itu, pengendalian memegang peranan yang sangat penting seperti yang terdapat di gampong Kuta Ateuh bahwasannya kontrol dipegang oleh Tuha Peut, Keuchik dan Pegawai gampong yang juga melibatkan warga pada prinsipnya adalah bentuk kerja sama dalam meminimalisir kelemahan- kelemahan yang dapat menghambat tercapainya pelaksanaan program.

4.2.2. Efektifitas manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status

1. Efektifitas perencanaan manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah manapun, selain dibutuhkan perencanaan yang baik sesuai dengan prosedur dan target pencapaian, maka dalam pelaksanaan dibutuhkan suatu analisis terutama dalam hal ketepatan waktu sesuai dengan target perencanaan. Ketepatan waktu adalah salah satu contoh efektifitas perencanaan pada manajemen yang hingga saat ini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program pelaksanaan bagi pemerintah maupun sebuah organisasi. Berkaitan dengan efektifitas perencanaan manajemen, Keuchik Kuta Ateuh memberikan pendapatnya bahwa:

“... kalau dibilang efektif dari pada perencanaan program maupun kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kami lakukan di desa Kuta Ateuh, bisa dibilang sudah efektif. Artinya sesuai dengan batas waktu program tau kegiatan yang dikerjakan, kami dapat merealisasikannya dengan baik”. (Wawancara, Januari 2014)

Pendapat diatas juga senada dengan komentar yang disampaikan oleh Ali bahwa:

“untuk efektifitas terealiasainya program pembangunan di gampong Kuta Ateuh, ada beberapa hal yang mendorong efektifitas tersebut, yaitu salah satunya kerja sama antara masyarakat dengan perangkat pegawai gampong. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk musyawarah untuk merumuskan perencanaan sampai pada tahap pengawasan proses berjalanya program” (Wawancara, Januari 2014)

Berdasarkan paparan hasil wawancara peneliti dengan responden diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen perencanaan yang terdapat di gampong Kuta Ateuh sudah efektif. Sesuai dengan wawancara, efektifitas perencanaan ini pada prinsip didukung oleh beberapa faktor yang mendorong terealiasainya program tepat pada waktunya, yaitu adanya keterlibatan warga dalam merumuskan perencanaan hingga pada proses pengawasan suatu proyek di gampong Kuta Ateuh. Untuk mengetahui pendapat responden secara umum dalam penelitian ini

terkait dengan efektifitas perencanaan manajemen di Gampon Kuta Ateuh dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Efektifitas perencanaan di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		Tidak		Cukup		Baik		Tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
1	Perencanaan (Panning)												
1.1	Keberhasilan Penyesuaian Agenda												
	a terealisasi tepat waktu	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	44,4%	4	44,4%	4
	b sesuai target perencanaan	11,1%	1	22,2%	2	66,7%	6	11,1%	1	33,3%	3	55,6%	5
	c kerja sama perangkat desa dengan masyarakat	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3	,0%	0	77,8%	7	22,2%	2
1.2	Keberhasilan pelaksanaan agenda perencanaan												
	a kerjasama merumuskan perencanaan	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	44,4%	4	44,4%	4
	b pengawasan proses perencanaan	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3
1.3	keberhasilan pelaksanaan keuangan	,0%	0	66,7%	6		3	33,3%	1	11,1%	5	55,6%	33,3%
1.4	keterlibatan publik dalam penyusunan rencana	,0%	0	33,3%	3		6	66,7%	1	11,1%	2	22,2%	66,7%

Tabel 4.6 menunjukkan pendapat 9 orang responden yang mengisi pertanyaan kusioner penelitian ini bahwa secara umum terdapat 6 responden dengan persentase 66,7 persen menyatakan bahwa efektifitas perencanaan di gampong Kuta Ateuh sudah cukup baik. Sedangkan hal yang paling menonjol dari hasil pernyataan responden adalah keterlibatan publik dalam proses penyusunan rencana suatu proyek di gampong sudah baik yaitu dengan persentase jawaban responden sebesar 66,3 persen.

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah manapun, selain dibutuhkan perencanaan yang baik sesuai dengan prosedur dan target pencapaian, maka dalam pelaksanaan dibutuhkan suatu analisis terutama dalam hal ketepatan waktu sesuai dengan target perencanaan. Ketepatan waktu adalah salah satu contoh efektifitas perencanaan pada manajemen yang hingga saat ini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program pelaksanaan bagi pemerintah maupun sebuah organisasi. Sesuai dengan hasil wawancara, efektifitas perencanaan ini pada prinsip didukung oleh beberapa faktor yang mendorong terealisasinya program tepat pada waktunya, yaitu adanya keterlibatan warga dalam merumuskan perencanaan hingga pada proses pengawasan suatu proyek di gampong Kuta Ateuh.

Untuk mengukur keberhasilan pengorganisasian suatu organisasi publik dalam internal organisasi yang dipimpinnya selaras dengan efektifitas pelaksanaan manajemennya, ada beberapa aspek yang diperhatikan yaitu (1) keberhasilan administrasi (2) keberhasilan menata pegawai (3) keberhasilan hubungan internal dan keberhasilan eksternal.

Dari pendapat yang disampaikan oleh responden dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam efektifitas perencanaan suatu organisasi terutama pada struktur pemerintahan gampong di Kuta Ateuh sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan responden diketahui bahwa pengorganisasian manajemen di gampong Kuta Ateuh sudah efektif, hal ini karena untuk mendorong keberhasilan organisasi gampong perlu didukung oleh sumber daya manusia yang menegrti dibidangnya

2. Efektifitas pengeorganisasian manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status

Untuk mengukur keberhasilan pengorganisasian suatu organisasi publik dalam internal organisasi yang dipimpinnya selaras dengan efektifitas pelaksanaan manajemennya, ada beberapa aspek yang diperhatikan yaitu (1) keberhasilan administrasi (2) keberhasilan menata pegawai (3) keberhasilan hubungan internal dan keberhasilan eksternal.

Berikut paparan pendapat yang disampaikan oleh responden terkait dengan efektifitas pengorganisasian manajemen yang terdapat di Gampong Kuta Ateuh.

“...menurut saya (Mukhtaruddin) pengorganisasian manajemen di gampong Kuta Ateuh sudah dapat dikatakan efektif. Ini dikarenakan aparat gampong yang bekerja sesuai dengan perencanaan organisasi yang kebanyakan mereka sudah paham apa itu pengelolaan administrasi” (wawancara, Januari 2014)

Senada dengan paparan yang disampaikan responden, Muhtaruddin pendapat selanjutnya juga di komentari Bukhari yang bahwa:

“..pengelolaan organisasi dapat dikatakan efektif apabila ada capaian keberhasilan yang menjadi ukurannya. Keberhasilan ini jelas ada indikatornya, misal aparat yang bekerja kemampuan dibidangnya. Artinya

efektifitas terhadap keberhasilan organisasi tergantung pada sumber daya organisasinya". (wawancara, Januari 2014).

Dari pendapat yang disampaikan oleh responden dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam efektifitas perencanaan suatu organisasi terutama pada struktur pemerintahan gampong di Kuta Ateuh sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan responden diketahui bahwa pengorganisasian manajemen di gampong Kuta Ateuh sudah efektif, hal ini karena untuk mendorong keberhasilan organisasi gampong perlu didukung oleh sumber daya manusia yang menegrti dibidangnya. Untuk mengetahui pendapat umum responden terhadap Efektifitas pengeorganisasian manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Efektifitas pengeorganisasian manajemen di Gampong Kuta Ateuh
setelah perubahan status

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		Cukup		baik		tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
2	Pengorganisasi (Organizing)												
2.1	keberhasilan administrasi	11,1%	1	33,3%	3	55,6%	5	11,1%	1	11,1%	1	77,8%	7
2.2	keberhasilan menata pegawai	22,2%	2	22,2%	2	55,6%	5	11,1%	1	11,1%	1	77,8%	7
2.3	keberhasilan hubungan internal	22,2%	2	44,4%	4	33,3%	3	11,1%	1	33,3%	3	55,6%	5
2.4	keberhasilan hubungan eksternal	22,2%	2	22,2%	2	55,6%	5	11,1%	1	11,1%	1	77,8%	7

Sumber: Data lapangan olahan februari 2014

Dari tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa secara umum 5 responden dengan persentase sebesar 55,6 persen memberikan pernyataannya tentang keberhasilan administrasi dan keberhasilan menata pegawai sudah baik. Sedangkan untuk hubungan internal dan eksternal organisasi masing-masing dengan persentase 33,3 persen dan 55,6 persen. Hasil ini menunjukkan secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian ditingkatkan aparatur desa gampong Kuta Ateuh sudah baik, dan disarankan perlu untuk ditingkatkan lagi agar dalam pelaksanaan organisasi ke depan dapat terkelola sesuai dengan target yang diinginkan.

3. Efektifitas pengarahan manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status

Berbicara manajemen pengarahan ditingkatkan pemerintahan desa erat kaitannya dengan pemimpin desa yang mampu memotivasi kinerja bawahannya dalam mengarahkan target perencanaan pelaksanaan program desa, bidang pelayanan administrasi kepada masyarakat, mengarahkan bawahannya dalam menjalin hubungan internal eksternal serta pengarahan dalam penyelesaian konflik dalam desa maupun konflik antar desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuchik kuta Ateuh yang memberikan komentarnya bahwa:

“..Dalam pengerjaan program gampong, terdapat bawahan yang kurang bersemangat menyelesaikan pekerjaan dikarenakan ada kendala-kendala yang terjadi dilapangan, adalah juga tugas saya sebagai Kuchik untuk memberikan motivasi kepada bawahan maupun masyarakat untuk mengevaluasi kendala-kendala yang terjadi. Dengan memberikan motivasi penyelesaian kendala-kendala yang mengambat pembangunan program desa kepada bawahan, maka dengan sendirinya bawahan ataupun pekerja tersebut akan termotivasi untuk menyelesaikan program pembangunan desa sesuai dengan target”. (Wawancara, Januari 2014)

Dari komentar yang disampaikan oleh Keuchik gampong Kuta Ateuh menunjukkan bahwa peran keuchik di gampong sebagai pemimpin desa memiliki tugas dan kewajiban untuk mengarahkan aparatur desanya dalam mendorong program pembangunan desa, serta hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah ketika bawahan mengalami kendala-kendala lapangan yang dapat menghambat tercapainya program pembangunan desa di gampong kuta Ateuh.

Sesuai dengan permasalahan tersebut responden, Mukhtaruddin memberikan juga pendapatnya bahwa:

“..Apabila di gampong kuta Ateuh terdapat warga yang saling berselisih, adalah sudah tugasnya Tuha Peut yang berkoordinasi dengan Kuchik dan bawahaannya untuk menyelesaikan warga yang berselisih”. (Wawancara, Januari 2014)

Dari pendapat yang disampaikan oleh responden dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desa pegawai memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja terhadap program pembangunan di gampong Kuta Ateuh. Peranan ini adalah memotivasi untuk bekerja sama dalam program-program pembangunan gampong, mengarahkan pelayanan administrasi yang baik kepada warga desa, mengarahkan hubungan internal eksternal dan mengarahkan bawahan maupun warga dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi didesanya. Untuk mengetahui pendapat umum responden terhadap efektifitas manajemen pengarahannya yang terdapat di Gampong Kuta Ateuh dapat dilihat pada tabel 4.8 Berikut:

Tabel 4.8
Efektifitas pengarahannya manajemen di Gampong Kuta Ateuh
setelah perubahan status

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		Cukup		baik		tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
3	Pengarahan (Leading)												
3.1	keberhasilan mengarahkan aparatur	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3	11,1%	1	33,3%	3	55,6%	5
3.2	keberhasilan mengarahkan program		0	44,4%	4	55,6%	5		0	22,2%	2	77,8%	7
3.3	keberhasilan mengarahkan administrasi	11,1%	1	22,2%	2	66,7%	6	11,1%	1	22,2%	2	66,7%	6
3.4	keberhasilan mengarahkan penyelesaian konflik	11,1%	1	33,3%	3	55,6%	5	11,1%	1	33,3%	3	55,6%	5

Sumber: Data lapangan olahan februari 2014

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa efektifitas pengarahan yang terdapat di gampong kuta Ateuh telah berdasarkan pernyataan responden menunjukkan 6 responden dengan persentase 66,7 persen menyatakan keberhasilan mengarahkan administrasi sudah baik. Sedangkan untuk keberhasilan menyelesaikan konflik dengan persentase 55,6 persen sudah berada dalam kategori baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengendalian organisasi di gampong Kuta Ateuh sudah baik

Berbicara manajemen pengarahan ditingkatkan pemerintahan desa erat kaitannya dengan pemimpin desa yang mampu memotivasi kinerja bawahannya dalam mengarahkan target perencanaan pelaksanaan program desa, bidang pelayanan administrasi kepada masyarakat, mengarahkan bawahannya dalam

menjalin hubungan internal eksternal serta pengarahan dalam penyelesaian konflik dalam desa maupun konflik antar desa.

Peran keuchik di gampong sebagai pemimpin desa memiliki tugas dan kewajiban untuk mengarahkan aparatur desanya dalam mendorong program pembangunan desa, serta hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah ketika bawahan mengalami kendala-kendala lapangan yang dapat menghambat tercapainya program pembangunan desa di gampong kuta Ateuh. Pegawai memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja terhadap program pembangunan di gampong Kuta Ateuh. Peranan ini adalah memotivasi untuk bekerja sama dalam program-program pembangunan gampong, mengarahkan pelayanan administrasi yang baik kepada warga desa, mengarahkan hubungan internal eksternal dan mengarahkan bawahan maupun warga dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi didesanya.

4. Efektifitas Koordinasi Manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi gampong

Melakukan koordinasi pada suatu lembaga pemerintahan merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan manajemen organisasi. Karena tanpa adanya koordinasi maka akan sangat sulit membangun maupun mengembangkan organisasi yang besar. Sesuai dengan gambaran di atas, Abdul Muthalib (44th) memberikan pendapatnya bahwa:

“...koordinasi ini berkaitan erat secara berkesinambungan, karena di desa Kuta Ateuh hampir setiap harinya banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintahan desa maupun warga desa ini sendiri. Selain itu juga koordinasi dilakukan dengan desa lainya dalam bentuk silaurrahmi maupun kerja sama antar desa terkait dengan pencapaian

program pembangunan gampong atau ada kegiatan lainnya yang saling membutuhkan kerja sama antar sesama warga gampong”.

Dari pendapat yang disampaikan oleh responden diatas menunjukkan bahwa manajemen koordinasi yang terdapat di pemerintahan gampong Kuta Ateuh telah membawa dampak positif dalam aspek pambangunan desa. Hal ini karena koordinasi yan dilakukan oleh atasan/keuchik terhadap bawahan/pegawai dan demikian juga sebaliknya merupakan bentuk bahwa pemerintahan gampong kuta Ateuh sebelum perubahan status pada telah mengenal manajemen koordinasi.

Tabel 4.9
Efektifitas koordinasi manajemen di Gampong Kuta Ateuh
setelah perubahan status

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		Cukup		baik		tidak		Cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
4	Koordinasi (Coordinating)												
4.1	keberhasilan koordinasi dengan bawahan	11,1%	1	33,3%	3	55,6%	5	11,1%	1	33,3%	3	55,6%	5
4.2	keberhasilan koordinasi dengan atasan	33,3%	3	33,3%	3	33,3%	3	22,2%	2	44,4%	4	33,3%	3
4.3	keberhasilan koordinasi dalam desa	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3		0	77,8%	7	22,2%	2
4.4	keberhasilan koordinasi dengan luar desa	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3		0	55,6%	5	44,4%	4

Sumber: Data lapangan olahan februari 2014

Koordinasi pada suatu lembaga pemerintahan merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan manajemen organisasi. Karena tanpa adanya koordinasi maka

akan sangat sulit membangun maupun mengembangkan organisasi yang besar. Koordinasi ini berkaitan erat secara berkesinambungan, karena di desa Kuta Ateuh hampir setiap harinya banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintahan desa maupun warga desa ini sendiri. Selain itu juga koordinasi dilakukan dengan desa lainya dalam bentuk silaurrahmi maupun kerja sama antar desa terkait dengan pencapaian program pembangunan gampong atau ada kegiatan lainnya yang saling membutuhkan kerja sama antar sesama warga gampong.

5. Efektifitas Pengendalian Manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status

Pengendalian merupakan aspek memantau daiam mengendalikan suatu organsiasi agar apa yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dikoodinasikan dapat terarah sesuai dengan pencapaian target yang direncanakan. Paparan wawancara dengan Keuchik Kuta Ateuh, ia memberikan komentan ya sebagai berikut:

“ pengendalian atau pelaksanaan kontrol dalam berbagai aspek pelaksanaan manajemen pemerintahan di gampong Kuta Ateuh, pada prinsipnya di kendalaikan secara bersama-sama yang melibatkan Tuha Peut, Keuchik, Pegawai desa bersama-sama warga desa. Dengan metode pengendalian yang demikian akan memudahkan pelaksanaan program, serta memudahkah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat pencapaian program.. (wawancara , Januari 2014)

Dari pendapat yang disampaikan oleh Keuchik Kuta Ateuh menunjukkan bahwa pengendalian pada intinya adalah untuk mengontrol beberapa aspek pelaksanaan manajemen desa terkait dengan keadaan organisasi desa, pegawai desa, keuangan dan sarana desa. Berkaitan dengan hal diatas Mukhtaruddin juga menyampaikan bahwa:

“Fungsi pengendalian adalah mengontrol pemerintahan desa agar pemerintahan desa terlaksana sesuai dengan aturan serta prosedur yang berlaku. Kontrol ini juga untuk menekan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa”. (Wawancara, januari 2014).

Dari dua pendapat yang disampaikan oleh responden berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian manajemen di gampong Kuta Ateuh dapat penulis simpulkan bahwa pengendalian memegang peranan yang sangat penting seperti yang terdapat di gampong Kuta Ateuh bahwasannya kontrol dipegang oleh Tuha Peut, Keuchik dan Pegawai gampong yang juga melibatkan warga pada prinsipnya adalah bentuk kerja sama dalam meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat tercapainya pelaksanaan program. Untuk mengetahui fungsi pengendalian manajemen berdasarkan hasil penelitian responden di gampong Kuta Ateuh dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Efektifitas pengendalian manajemen di Gampong Kuta Ateuh
setelah perubahan status

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		Cukup		baik		tidak		cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
5	Pengendalian (Controlling)												
5.1	keberhasilan pengendalian organisasi	11,1%	1	77,8%	7	11,1%	1	11,1%	1	66,7%	6	22,2%	2
5.2	keberhasilan pengendalian pegawai		0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3
5.3	keberhasilan pengendalian keuangan		0	100,0%	9		0	,0%	0	100,0%	9	,0%	0
5.4	keberhasilan pengendalian sarana		0	100,0%	9		0	11,1%	1	77,8%	7	11,1%	1

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa secara umum responden memberikan pendapatnya terkait dengan efektivitas penanganan manajemen di gampong kuta Ateuh bahwa manajemennya sudah cukup dengan persentase rata-rata 100,0 persen. Karena itu perlu ditingkatkan kembali efektivitas pengendalian ini agar berada pada kategori baik dengan tujuan berhasil dalam berbagai aspek pengendalian dan berhasil dalam pelaksanaan program – program di gampong Kuta Ateuh.

Pengendalian merupakan aspek memantau dalam mengendalikan suatu organisasi agar apa yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dikoodinasikan dapat terarah sesuai dengan pencapaian target yang direncanakan. Tanpa adanya pengendalian manajemen maka memungkinkan semua yang telah dilaksanakan akan gagal karena tidak adanya kontrol yang baik dari seorang pemimpin maupun anggota

4.2.3. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Fungsi manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status

1. Pernyataan Responden Penelitian Terhadap Faktor Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi pemerintah akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam menjalankan pemerintahannya tersebut, begitu juga dengan pemerintahan di Gampong Kuta Ateuh, dimana pemerintah dalam hal ini pimpinan Gampong sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab atas masalah manajemen di pemerintahannya. Berkaitan dengan hal ini, faktor-faktor yang mendorong fungsi manajemen di Gampong Kuta Ateuh yaitu faktor sumber daya manusia. Hasil wawancara dengan pak Keuchiek gampong kuta Ateuh, yang mengatakan bahwa:

“...sesungguhnya sumber daya manusia adalah masalah krusial di negeri ini, ditempat kami masalah sumber daya manusia menjadi hal yang harus kita perbaiki secara terus menerus, baik sumber daya manusia secara umum, maupun sumber daya manusia yang ada di pemerintahan gampong kuta Ateuh. Sebab, SDM merupakan faktor penentu baik buruknya suatu pemerintahan di gampong, apalagi sebagai gampong yang berada di Kota Sabang dengan kategori wilayah yang sering keluar masuk warga asing dan juga wilayah strategis internasional” (wawancara, februari 2014)

Perlu diakui bahwa SDM merupakan faktor terpenting dalam perjalanan suatu organisasi pemerintah. Apalagi pemerintahan dengan wilayah yang terletak di daerah terpenting seperti sabang atau kota lainnya, sehingga dengan SDM yang rendah, maka tidak akan mampu mengurus pemerintahan secara baik, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik yang disarankan internasional, atau kita kenal dengan istilah *good governance*. Responden lainnya, Abdul Mutallib mengatakan bahwa:

“...hari ini kita tidak dapat mengatakan bahwa kita orang yang sukses dan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, padahal sumber daya manusia kita rendah, baik dalam menjalankan administrasi maupun dalam memperhatikan potensi yang ada di pemerintahan, maka menurut saya SDM adalah faktor yang paling mempengaruhi dalam lingkungan suatu masyarakat” (wawancara, februari 2014)

Menyangkut dengan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dapat kita lihat dalam tabel berikut ini, dimana pada umumnya responden menganggap bahwa faktor sumber daya manusia yang ada di gampong kuta Ateuh tergolong cukup, baik saat masih menjadi kelurahan maupun setelah perubahan status menjadi gampong, hanya saja persentasenya yang berbeda. Perbedaan hanya sedikit, yaitu saat masih menjadi kelurahan angka persentase Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan lebih banyak dibandingkan dengan setelah perubahan status, menjadi gampong, namun tetapi berada pada kategori cukup, dalam arti tidak jelek dan tidak juga baik sekali. Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia di

gampong Kuta Ateuh masih menjadi hal yang harus diperbaiki terutama sekali setelah perubahan status kelurahan menjadi Gampong Kuta Ateuh saat ini.

Tabel 4.11
Pernyataan Responden Penelitian Terhadap Faktor Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		cukup		baik		tidak		cukup		baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
1	Manusia (Man)												
1.1	Kualitas personalia												
a	Jenjang pendidikan aparatur desa		0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3
			,0%										
b	keterampilan aparatur desa		0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	44,4%	4	44,4%	4
			,0%										
1.2	Kualitas Pimpinan												
a	capaian kerja		0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3
			,0%										
b	Kekompakan		0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3
			,0%										
1.3	kualitas tenaga pendukung	11,1%	1		55,6%		33,3%		22,2%		55,6%		22,2%

Sumber: Data lapangan olahan februaru 2014

Suatu organisasi pemerintah akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam menjalankan pemerintahannya tersebut, begitu juga dengan pemerintahan di Gampong Kuta Ateuh, dimana pemerintah dalam hal ini pimpinan Gampong sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab atas masalah manajemen di pemerintahannya. Perlu diakui bahwa SDM merupakan faktor terpenting dalam perjalanan suatu organisasi pemerintah. Apalagi pemerintahan dengan wilayah yang terletak di daerah terpenting seperti sabang atau kota lainnya, sehingga

dengan SDM yang rendah, maka tidak akan mampu mengurus pemerintahan secara baik, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik yang disarankan internasional, atau kita kenal dengan istilah *good governance*.

Menyangkut dengan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dapat kita lihat dalam tabel, dimana pada umumnya responden menganggap bahwa faktor sumber daya manusia yang ada di gampong kuta Ateuh tergolong cukup, baik saat masih menjadi kelurahan maupun setelah perubahan status menjadi gampong, hanya saja persentasenya yang berbeda. Perbedaan hanya sedikit, yaitu saat masih menjadi kelurahan angka persentase Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan lebih banyak dibandingkan dengan setelah perubahan status, menjadi gampong, namun tetapi berada pada kategori cukup, dalam arti tidak jelek dan tidak juga baik sekali. Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia di gampong Kuta Ateuh masih menjadi hal yang harus diperbaiki terutama sekali setelah perubahan status kelurahan menjadi Gampong Kuta Ateuh saat ini.

2. Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Keuangan

Faktor lainnya adalah faktor keuangan, menurut responden yang telah penulis wawancara, bahwa selain faktor sumber daya manusia, faktor keuangan juga merupakan faktor terpenting dalam pengelolaan gampong, terutama gampong kuta Ateuh, dalam hal ini responden bapak Bukari mengatakan bahwa:

“...tanpa uang kita tidak bisa membangun, uang menjadi hal yang sangat urgen dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Uang yang dimaksudkan yaitu dana operasional untuk pembangunan suatu wilayah” (wawancara, februari 2014)

Dalam teori manajemen, uang merupakan daya dorong dan kekuatan yang sangat penting yang harus secara optimal terdapat dalam suatu pemerintahan. Jadi, SDM dan SDE merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini, responden mukhtaruddin bahwa:

“ ..sumber daya energy (SDE) dalam hal ini uang, merupakan kekuatan dalam pembangunan suatu kawasan, tidak mungkin kita dapat melakukannya tanpa uang, apalagi untuk membangun infrastruktur, sudah tentu kita akan membutuhkan banyak dana untuk itu” (wawancara, februari 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat dilihat dari tabel 4.12 berikut ini. menurut responden yang diwawancarai bahwa mereka mengatakan tentang uang yang terdapat dalam pelaksanaan pemerintahan, Masyarakat menilai uang atau dana yang terdapat dalam pemerintahan termasuk ke dalam kategori cukup untuk membangun Gampong Kuta Ateuh. Hal ini sebagai mana yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Keuangan

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		cukup		baik		tidak		cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
2	Keuangan (Money)												
2.1	ketepatan menggunakan uang desa	11,1%	1	88,9%	8	,0%	0	11,1%	1	88,9%	8	,0%	0
2.2	penguatan keuangan desa												
	a Kecukupan anggaran desa	11,1%	1	77,8%	7	11,1%	1	22,2%	2	77,8%	7	0%	0
	b Pendapatan desa	22,2%	2	77,8%	7	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3	,0%	0

Sumber: data lapangan, olahan february 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang responden atau 88,9% mengatakan bahwa menurut mereka sumber dana yang terdapat dalam gampong kuta Ateuh sangat cukup untuk melaksanakan pemerintahan secara efektif. Dan menurut mereka juga bahwa uang adalah faktor terpenting lainnya menyangkut dengan pelaksanaan pemerintahan selain faktor Sumber Daya Manusia.

Faktor keuangan, menurut responden yang telah penulis wawancarai, bahwa selain faktor sumber daya manusia, faktor keuangan juga merupakan faktor terpenting dalam pengelolaan gampong, terutama gampong kuta Ateuh, uang merupakan daya dorong dan kekuatan yang sangat penting yang harus secara optimal terdapat dalam suatu pemerintahan. Tanpa uang tidak dapat kita lakukan pembangunan. Negara dengan anggaran yang cukup akan dapat melakukan perencanaan pembangunan yang baik, dan sebaliknya bahwa Negara dengan ketersediaan dana yang minim akan mengakibatkan keterbelakangan dalam sektor pembangunan.

3. Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Material

Faktor yang ketiga yaitu faktor material, atau kita sebut dengan faktor Sumber Daya Alam, sarana dan prasarana. Antara faktor sumber daya alam, sumber daya energy (money) dan sumber daya alam memang tiga faktor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini, menurut Ali bahwa:

“ ..sumber daya alam yang tersedia di wilayah kita tergolong baik, akan tetapi sebagai wilayah yang berdekatan dengan laut, sumber daya laut yang kita punya menjadi sumber daya yang sangat penting untuk kita jaga bersama.” (wawancara, februari 2014)

Selain sumber daya alam, bicara faktor material kita harus melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di gampong kuta Ateuh. Dalam hal ini hasil wawancara bapak Bukhari mengatakan bahwa:

“...sarana dan prasarana yang tersedia dalam pemerintahan dan gampong kita tergolong cukup, namun kita butuh sarana dan prasarana yang lebih baik lagi, hal ini untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, misalnya kita punya computer, tetapi computer yang kita miliki tersebut masih tergolong computer lama dan diperlukan computer baru, agar mudah menjalankan aktifitas perkantoran menyangkut dengan administrasi” (wawancara, feberuari 2014)

Pembicaraan material, harus tertuju kepada ketersediaan sarana dan prasarana kantor, selain itu juga sumber daya alam yang ada, hal ini sebagai instrument pendukung dalam kelancaran pemerintahan dalam suatu wilayah. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka akan menjadi kendala besar bagi pemerintah untuk mengimplimentasikan rencana program yang telah jauh-jauh hari diprogramkan serta diprioritaskan. Menyangkut dengan material yang terdapat di gampong Kuta Ateuh sebagaimana yang terlihat dalam tabel 4.13 berikut ini, dimana terdapat perbedaan antara sarana dan prasarana yang ada di gampong sebelum dan sesudah pemekaran.

Tabel 4.13
Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Material

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		cukup		baik		tidak		cukup		baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
3	Material (Materials)												
3.1	keberadaan sarana	,0%	0	88,9%	8	11,1%	1	22,2%	2	77,8%	7	,0%	0
3.2	keberadaan sumber daya alam	,0%	0	100,0%	9	,0%	0	100,0%	9	,0%	0	,0%	0

Sumber: data lapangan olahan feberuari 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya responden mengatakan material pemerintahan di gampong kuta Ateuh cukup untuk menjalankan roda

organisasi, hanya saja antara setelah dan sebelum perubahan status terdapat perbedaan, dimana sebelum perubahan status material lebih bagus dibandingkan dengan setelah perubahan status, namun untuk kategori sumber daya alam tetap sama, tidak ada perbedaan setelah dan sebelum pemekaran.

Pembicaraan material, harus tertuju kepada ketersediaan sarana dan prasarana kantor, selain itu juga sumber daya alam yang ada, hal ini sebagai instrument pendukung dalam kelancaran pemerintahan dalam suatu wilayah. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka akan menjadi kendala besar bagi pemerintah untuk mengimplimentasikan rencana program yang telah jauh-jauh hari diprogramkan serta diprioritaskan. Pada umumnya responden mengatakan material pemerintahan di gampong kuta Ateuh cuku untuk menjalankan roda organisasi, hanya saja antara setelah dan sebelum perubahan status terdapat perbedaan, dimana sebelum perubahan status material lebih bagus dibandingkan dengan setelah perubahan status, namun untuk kategori sumber daya alam tetap sama, tidak ada perbedaan setelah dan sebelum pemekaran.

4. Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Mesin

Menyangkut dengan peristilahan mesin, dalam operasional variabel yang tergolong ke dalam mesin yaitu jumlah ketersediaan inventaris desa, kelengkapan sarana dan prasarana desa serta bangunan yang terdapat di dalam desa. Dalam hal ini menurut responden Mukhtaruddin bahwa:

“...invenaris desa kita tergolong cukup dan malah lebih baik saat ini dari sebelum pemekaran, ketersediaan lahan di desa kita juga cukup bagus dan potensial untuk dijadikan lahan produktif” (wawancara februari 2014)

Lahan produktif sesuai dengan hasil observasi penulis seperti perkebunan dan perikanan cukup bagus yang terdapat di gampong kuta Ateuh. Selain itu, faktor inventaris desa yang memadai serta bangunan sebagai sarana pendorong tumbuh dan berkembangnya gampong kuta Ateuh. Hal ini juga sama seperti apa yang disampaikan oleh pak Keuchiek, yaitu:

“... di Gampong Kuta Ateuh terdapat lahan yang sangat luas dan sangat produktif dan berfungsi sebagai penopang ekonomi pedesaan. Saya sebagai pimpinan pemerintah di Gampong ini akan terus menjadikan inventaris desa menjadi lebih baik dan juga ketersediaan lahan produktif tadi” (wawancara februari 2014)

Mesin yang dimaksudkan yaitu ketersediaan lahan dan ketersediaan bangunan sebagai sarana pendorong, antara sebelum perubahan status dengan setelah perubahan status, responden memberikan pendapat bahwa bicara inventaris gampong jauh lebih bagus sekarang dibandingkan sebelum perubahan status, khususnya pada item inventaris gampong. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam tabel 4.14. berikut ini:

Tabel 4.14
Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Mesin

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		cukup		Baik		tidak		cukup		baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
4	Mesin (Mechine)												
4.1	jumlah ketersediaan inventaris desa	,0%	0	77,8%	7	22,2%	2	11,1%	1	88,9%	8	,0%	0
4.2	kelengkapan prasaran												
a	Lahan desa	,0%	0	100,0%	9	,0%	0	11,1%	1	88,9%	8	,0%	0
b	Bangunan desa	,0%	0	88,9%	8	11,1%	1	88,9%	8	11,1%	1	0%	0

Sumber: Data lapangan olahan februari 2014

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden memberikan pernyataan bahwa faktor ketersediaan lahan dan inventaris desa serta bangunan yang terdapat di Gampong kuta Ateuh cukup memadai dan menjadi penopang bagi pembangunan gampong. Masyarakat menilai kalau lahan tersebut memang cukup bagus, baik lahan pertanian, perkebunan maupun lahan perikanan yang sangat potensial untuk dijadikan sumber penopang ekonomi kerakyatan di gampong kuta Ateuh.

Menyangkut dengan peristilahan mesin, dalam operasional variabel yang tergolong ke dalam mesin yaitu jumlah ketersediaan inventaris desa, kelengkapan sarana dan prasarana desa serta bangunan yang terdapat di dalam desa. Lahan produktif sesuai dengan hasil observasi penulis seperti perkebunan dan perikanan cukup bagus yang terdapat di gampong kuta Ateuh. Selain itu, faktor inventaris desa yang memadai serta bangunan sebagai sarana pendorong tumbuh dan berkembangnya gampong kuta Ateuh. Mesin yang dimaksudkan yaitu ketersediaan lahan dan ketersediaan bangunan sebagai sarana pendorong, antara sebelum perubahan status dengan setelah perubahan status, lahan responden memberikan pendapat bahwa bicara inventaris gampong jauh lebih bagus sekarang dibandingkan sebelum perubahan status, khususnya pada item inventaris gampong.

5. Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Metode

Faktor selanjutnya yaitu faktor metode yang diterapkan dalam manajemen kepemimpinan di gampong kuta Ateuh, baik menyangkut dengan persoalan strategi maupun menyangkut dengan jumlah dukungan personalia atau aparatur

pemerintahan gampong. Dalam hal ini pak Keuchiek gampong kuta Ateuh menjelaskan bahwa:

“...untuk mencapai tahapan pembangunan yang baik, kita membutuhkan suatu strategi, baik dalam hal mengelola tenaga ahli, mengelola asset maupun mengelola pekerjaan yang diamanahkan, selain itu kami sebagai pimpinan akan menerapkan sistem kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di gampong ini” (wawancara februari 2014)

Harus kita sadari bahwa metode merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu pekerjaan, dalam hal ini penggunaan metode yang tepat akan mengakibatkan tingkat kesuksesan pelaksanaan program lebih baik dibandingkan dengan sama sekali tidak menggunakan strategi. Maka ada istilah bahwa dalam setiap pembangunan desa ada istilah rencana strategis yang dibuat dan akan dicapai bersama pemerintahan gampong. Menyangkut dengan hal ini, responden mukhtaruddin mengatakan bahwa:

“... di gampong kita ada istilah rencana strategis yang dibuat oleh pemerintahan, saya pikir itu suatu yang bagus, walau saya sendiri hanya terlibat dalam musrenbang, tetapi itu semua demi pembangunan yang adil di gampong ini, maka tidak heran bahwa suatu gampong akan tertinggal jika tidak menerapkan metode tertentu dalam pelaksanaan pemerintahannya itu” (wawancara Februari 2014).

Dari dua hasil wawancara yang dipaparkan di atas, juga sama seperti yang disampaikan responden lain, sebagaimana yang dimuat dalam tabel 4.14 berikut ini, dimana menurut responden dukungan jumlah jam kerja masih sangat minim, baik sebelum perubahan status maupun setelah perubahan status. Selain itu bahwa dukungan peralatan juga masih sangat minim, dan perlu adanya penguatan akan masalah ini untuk sebagai pendorong pembangunan di Gampong Kuta Ateuh.

Tabel 4.15
Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Metode

No	Pernyataan Responden Penelitian	Setelah Perubahan Status						Sebelum Perubahan Status					
		tidak		cukup		Baik		tidak		cukup		Baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
5	Metode (Method)												
5.1	dukungan jumlah jam kerja	44,4%	4	22,2%	2	33,3%	3	55,6%	5	11,1%	1	33,3%	3
5.2	dukungan akan peralatan	55,6%	5	44,4%	4	,0%	0	,0%	5	44,4%	4	0%	0
5.3	Cara Capaian Kinerja												
a	koordinasi dengan instansi terkait	0%	0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3
b	menentukan target yang akan dicapai	,0%	0	66,7%	6	33,3%	3	11,1%	1	55,6%	5	33,3%	3

Sumber: Data lapanganolahan february 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada item pencapaian kerja atau metode yang digunakan tergolong cukup, sedangkan menyangkut dengan target yang tercapai yang masih sangat minim pada saat sebelum perubahan status, sedangkan pada masa setelah perubahan status pencapaian target lebih tercapai. Untuk item koordinasi dengan instansi terkait, tergolong cukup baik sebelum maupun setelah perubahan status terjadi.

Faktor metode yang diterapkan dalam manajemen kepemimpinan di gampong kuta Ateuh, baik menyangkut dengan persoalan strategi maupun menyangkut dengan jumlah dukungan personalia atau aparatur pemerintahan

gampong. Harus kita sadari bahwa metode merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu pekerjaan, dalam hal ini penggunaan metode yang tepat akan mengakibatkan tingkat kesuksesan pelaksanaan program lebih baik dibandingkan dengan sama sekali tidak menggunakan strategi. Maka ada istilah bahwa dalam setiap pembangunan desa ada istilah rencana strategis yang dibuat dan akan dicapai bersama pemerintahan gampong.

6. Pernyataan Responden Penelitian Terhadap Faktor Pemasaran

Selain faktor yang telah di jelaskan di atas tadi, faktor pemasaran menjadi faktor terpenting di antaranya, hal ini untuk menambah kekuatan keuangan di Gampong Kuta Ateuh. Dalam hal ini menurut bapak Bukhari bahwa:

“...bahwa saat ini pemasaran yang terdapat di gampong kita secara umum tergolong baik, yaitu dimana hasil yang terdapat di desa mudah dipasarkan. Saat ini lebih baik dibandingkan dengan sebelum perubahan status, ini harus diberi apresiasi kepada pemerintah gampong yang telah membantu adanya pemasaran yang bagus” (wawancara februari, 2014)

Secara teori, pemasaran menjadi penting bagi daerah yang memiliki sumber daya yang baik, seperti sabang. Dimana pemasaran dalam definisi umum adalah pemasaran semua sektor. Pemasaran yang baik didasarkan pada strategi yang digunakan, jika strateginya baik, maka pemasaran dapat terlaksana dengan baik pula, dan jika strateginya tidak baik maka akan tidak mampu membangun perekonomian masyarakatnya. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh bapak Mukhtaruddin bahwa:

“.... Ini yang menjadi penting dan kami khawatir akan hal ini, kami butuh bantuan dari berbagai pihak untuk memasarkan hasil yang ada di Gampong kami dan potensial” (wawancara, februari 2014)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa pemasaran memang hal yang sangat urgen secara teori ekonomi, Negara dengan hasil yang baik namun tidak dapat dipasarkan dengan baik maka hasil alam yang ada di Negara tersebut juga tidak akan pernah laku, dan secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan Negara tersebut, begitu juga dengan organisasi pemerintah dalam skup kecil setingkat gampong, sebagaimana yang terlihat dalam tabel 4.16.

Tabel 4.16
Pernyataan Responden Penelitian terhadap Faktor Pemasaran

No	Pernyataan Responden Penelitian	setelah perubahan status						sebelum perubahan status					
		tidak		cukup		Baik		tidak		cukup		baik	
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml
6	Pemasaran (Market)												
6.1	kualitas layanan jasa terhadap masyarakat												
	a layanan jasa terhadap keperluan masyarakat	0%	0	33,3%	3	66,7%	6	11,1%	1	44,4%	4	44,4%	4
	b layanan jasa terhadap kepuasan masyarakat	,0%	0	44,4%	4	55,6%	5	11,1%	1	44,4%	4	44,4%	4
6.2	standar jasa yang diberikan	,0%	0	55,6%	5	44,4%	4	,0%	0	33,3%	3	66,7%	6
6.3	Manfaat standar jasa yang diberikan	,0%	0	55,6%	5	44,4%	4	,0%	0	44,4%	4	55,6%	5

Sumber: Data lapanganolahan february 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden melihat layanan terhadap jasa cukup bagus pada masa sebelum perubahan status, begitu juga dengan

standar layanan yang diberikan, serta manfaat standar layanan yang diberikan. Sedangkan pada masa kini, layanan jasa lumayan menurun dibandingkan dengan sebelum perubahan status, hal ini sebagaimana yang terlihat dalam tabel di atas. Khusus pada sektor standar jasa yang diberikan, antara dulu dengan sekarang memang terdapat perbedaan, dimana sekarang lebih bagus dibandingkan dengan dulu, sedangkan layanan jasa sebaliknya.

Faktor pemasaran menjadi faktor terpenting di antaranya, hal ini untuk menambah kekuatan keuangan di Gampong Kuta Ateuh. Secara teori, pemasaran menjadi penting bagi daerah yang memiliki sumber daya yang baik, seperti sabang. Dimana pemasaran dalam definisi umum adalah pemasaran semua sektor. Pemasaran yang baik didasarkan pada strategi yang digunakan, jika strateginya baik, maka pemasaran dapat terlaksana dengan baik pula, dan jika strateginya tidak baik maka akan tidak mampu membangun perekonomian masyarakatnya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Fungsi manajemen yang dijalankan di gampong kuta ateuh setelah perubahan status telah menunjukkan tanda-tanda yang positif, artinya dengan adanya perubahan status, bukan berarti manajemen yang dijalankan di gampong Kuta Ateuh menjadi lebih buruk, tetapi tergolong stabil dan termasuk ke dalam kategori cukup. Maksud dari stabil yaitu tertuju kepada adanya beberapa item penting dari manajemen, yaitu; stabil dalam perencanaan, stabil dalam pengorganisasian, stabil dalam pengarahan, stabil dalam melakukan koordinasi dan serta stabil dalam hal pengendalian. Istilah stabil ini tertuju kepada tidak adanya semacam menurunnya kualitas secara drastis, dan termasuk ke dalam kategori baik.
2. Manajemen gampong Kuta Ateuh tergolong efektif di jalankan, hal ini ditandai dari kemampuan dalam perencanaan cukup bagus, baik sebelum perubahan status maupun sesudah perubahan status. Kemudian juga dilihat di pengorganisasian yang terdapat di gampong kuta ateuh juga tergolong berjalan efektif, hal ini menyangkut dengan pengorganisasian kantor dan hal lain yang menyangkut dengannya. Selanjutnya, menyangkut dengan pengarahan dan pengendalian yang terjadi setelah perubahan status di Gampong Kuta Ateuh juga berjalan normal serta baik. Pengendalian dimaksud menyangkut dengan pengendalian atas tugas-tugas dan

kewenangan dari aparaturnya secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan kesemuanya itu berjalan secara baik setelah terjadinya perubahan status dari kelurahan menjadi Gampong Kuta Ateuh.

3. Berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat fungsi pelaksanaan manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahannya status tertuju kepada beberapa tolak ukur, yaitu: faktor Sumber Daya Manusia, sumber daya keuangan, material, mesin serta metode. Dimana sumber daya aparaturnya di Gampong Kuta Ateuh merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan efektif tidaknya pelaksanaan manajemen, dan hasil temuan bahwa sumber daya manusia di Gampong Kuta Ateuh tergolong cukup, secara teori dapat mendorong lahirnya efektifitas pelaksanaan manajemen di Gampong Kuta Ateuh Setelah perubahan status dari kelurahan menjadi Gampong.

5.2.Saran

Atas dasar penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa masukan sebagai berikut, yaitu:

1. Berkaitan dengan fungsi pemerintahan Gampong Kuta Ateuh yang masih baru, maka disarankan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai metode. Salah satu metodenya yaitu diperlukannya pelatihan pengurusan desa, baik secara administrative, pelatihan keuangan maupun pelatihan materi perundang-undangan tentang tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat gampong (desa).

2. Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi kinerja di tingkat organisasi pemerintahan Gampong, maka perlu dibangun *sense of belonging* (rasa saling memiliki) antara sesama aparatur pemerintahan maupun dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaktifan lembaga-lembaga yang ada di Gampong untuk ikut bertanggung jawab secara bersama-sama tentang kepentingan Gampong.
3. Diperlukan suatu data yang integral tentang Gampong Kuta Ateuh, sehingga dengan demikian akan diketahui tentang peluang dan tantangan dalam memajukan Gampong Kuta Ateuh dari berbagai sektor.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Akhmad Solikin (2006 Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan”, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2 No.2 Nopember 2006
- Bagong, Suyanto. (2005). *Metode penelitian social: berbagai alternative pendekatan*. Jakarta:Prenada Media.
- Black, James. (2001). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung:Refika Aditama.
- Brewer, P. C., Garrison, E. J., & Noreen, E. W. 2006. *Akuntansi manajerial* jilid 1 (edisi 11). (Alih bahasa Hinduan, N.) Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Effendy, Onong Uchjana. 1998. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Eko Indrajit, Richardus. (2004). *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Andi.
- Evers, Hans. (1988). *Teori masyarakat : Proses Peradaban Dalam Sistim Dunia Modern*. Jakarta:Yayasan Obor indonesia
- Firmansyah. 2008. *faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Propinsi DKI Jakarta*.
- Hasibuan. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, Jogiyanto. (1999). *Pengenalan Komputer Dasar Ilmu Komputer, Pemograman, Sistem Informasi dan Intelegensi Buatan*. Yogyakarta:AND
- Haryanto, Sahrudin, Arifuddin, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasan, Iqbal. (2002). *Poko-Poko Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Haoran Lu, 1998, Performance Budgeting Resuscitated: “Why is it still inviable?”,
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta

- Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jeliteng Pribadi: *Manajemen Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh*: Makalah yang disampaikan pada seminar Aceh Investment, bertempat di Aula Gubernur Aceh. Tahun 2012.
- Kencana, Inu dan Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2000). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rafiak Aditama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Martini dan Rosdiana. 2003. *Komitmen Organisasi Ditinjau Berdasarkan Organisasi dan Motivasi Kerja*. Jurnal phronesis. Vol. 5 No. 9.
- M. Nafarin. 2000. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen (Konsep, Manfaat, dan Rekayasa)* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul Chomsiah (2007). *Tingkat Kontinuitas Penyediaan Informasi Yang Mempengaruhi Tingkat Keefektifan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*
- PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Ruky, Ahmad. S. (2001). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sastropoetro, R.A. Santoso.(1998). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung:Penerbit Alumni.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*.Penerbit Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Uber. (2006). *Metode Penelitian sosial*. Bandung:Unpar Press
- Sedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung:Mandar Maju.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Susanto, Azhar. (2004). *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung:Lingga Jaya.
- Sutarbi, Tata. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta:ANDI.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang keuangan*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang pemerintahan daerah*
- Tachjan.(2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung:AIPI.
- Wang, XiaoHu, 1999, "Conditions to implement outcome-oriented performance budgeting: some empirical evidence", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Winter 1999;11,4
- Wahab, S.A.(1990). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Wahyono, Teguh. (2004). *Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi*. Yogyakarta:GRAHA ILMU.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang:Bayumedia Publishing
- Widjaja, A.W. (1985). *Penerapan Motivasi Dalam Kepemimpinan*. Jakarta:Era Swara.
- Winardi, J.(1980). *Pengantar Tentang Teori sistem dan Analisa sistem*. Jakarta:PT. Karya Nusantara.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik:Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

LAMPIRAN 1**INSTRUMEN PENELITIAN****A. PETUNJUK PENGISIAN**

Berikut ini merupakan pertanyaan menyangkut dengan perubahan status kelurahan menjadi desa. Bapak/ibu diharapkan dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan memberi tanda kontreng pada kolom 1,2,3 disampingnya.

B. KETERANGAN:

- 1 : tidak baik
2 : cukup
3 : Baik

C. PERTANYAAN

1. sistem manajemen yang terdapat di gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status kelurahan menjadi Gampong.

NO	PERTANYAAN	KONDISI SEBELUM PERUBAHAN STATUS			KONDISI SETELAH PERUBAHAN STATUS			KETERANGAN
		1	2	3	1	2	3	TANGGAPAN
1	Perencanaan (<i>Planning</i>)							
1.1	Metode identifikasi masalah untuk perencanaan							
1.2	Teknik perumusan agenda perencanaan							
1.3	Materi perencanaan							
1.4	Keterlibatan public dalam penyusunan rencana							
2	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)							
2.1	Bagaimanakah keadaan administrasi							
	a. Pengurusan surat menyurat							
	b. Pembuatan Qanun gampong							
	c. Keuangan desa							
2.2	Bagaimanakah keadaan pegawai							
	a. Sumber daya pegawai							
	b. Tingkat kedisiplinan pegawai							
2.3	Bagaimana Sikap terhadap pegawai							
	a. Hubungan kerja							
	b. Koordinasi dalam bagan organisasi							
2.4	Hubungan internal kelurahan/ desa							
	a. Lembaga tuha peut dengan Keuchik							
	b. Keuchik dengan Perangkat desa							
	c. Keuchik dengan masyarakat							
2.5.	Hubungan eksternal kelurahan/desa							
	a. Hubungan ditingkat pemerintahan lebih tinggi							
	b. Hubungan antar desa lainnya							

3	Pengarahan (<i>Leading</i>)							
3.1	Pengarahan motivasi dan kerjasama pegawai							
3.2	Pengarahan target pencapaian program							
3.3	Pengarahan pelayanan administrasi							
3.4	Pengarahan bidang hubungan internal							
3.5	Pengarahan hubungan eksternal							
3.6	Pengarahan penyelesaian konflik							
4	Koordinasi (<i>coordinating</i>)							
4.1.	Koordinasi dengan bawahan							
4.2.	Koordinasi dengan atasan							
4.3.	Koordinasi dalam desa/kelurahan							
4.4.	Koordinasi dengan luar desa/kelurahan							
5	Pengendalian (<i>controlling</i>)							
5.1.	Pengendalian organisasi							
5.2.	Pengendalian pegawai							
5.3	Pengendalian keuangan							
5.4	Pengendalian sarana							

2. Efektifitas manajemen gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status tersebut?

NO	PERTANYAAN	KONDISI SEBELUM PERUBAHAN STATUS			KONDISI SETELAH PERUBAHAN STATUS			KETERANGAN
		1	2	3	1	2	3	TANGGAPAN
1	Perencanaan (<i>Planning</i>)							
1.1	Keberhasilan menyelesaikan agenda perencanaan a. Terealisasi tepat waktu b. Sesuai target perencanaan c. Kerjasama perangkat desa dan masyarakat							
1.2	Keberhasilan pelaksanaan agenda perencanaan a. Kerjasama merumuskan perencanaan b. Pengawasan proses perencanaan							
1.3	Keberhasilan pelaksanaan keuangan							
1.4	Keterlibatan public dalam penyusunan rencana							
2	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)							
2.1	Keberhasilan administrasi							
2.2	Keberhasilan menata pegawai							
2.3	Keberhasilan Hubungan internal							
2.4	Keberhasilan Hubungan eksternal							
3	Pengarahan (<i>Leading</i>)							
3.1	Keberhasilan mengarahkan aparatur							
3.2	Keberhasilan mengarahkan program							
3.3	Keberhasilan Pengarahan administrasi							
3.4	Keberhasilan Pengarahan penyelesaian konflik							
4	Koordinasi (<i>coordinating</i>)							
4.1.	Keberhasilan Koordinasi dengan bawahan							
4.2.	Keberhasilan Koordinasi dengan atasan							
4.3.	Keberhasilan Koordinasi dalam desa/kelurahan							
4.4.	Keberhasilan Koordinasi dengan luar desa/kelurahan							

5	Pengendalian (<i>controlling</i>)							
5.1.	Keberhasilan Pengendalian organisasi							
5.2.	Keberhasilan Pengendalian pegawai							
5.3.	Keberhasilan Pengendalian keuangan							
5.4.	Keberhasilan Pengendalian sarana							

3. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Fungsi Manajemen di Gampong Kuta Ateuh setelah perubahan status

NO	PERTANYAAN	KONDISI SEBELUM PERUBAHAN STATUS			KONDISI SETELAH PERUBAHAN STATUS			KETERANGAN
		1	2	3	1	2	3	TANGGAPAN
1	Manusia (<i>man</i>)							
1.1	Kualitas personalia							
	a. Jenjang pendidikan aparatur desa							
	b. Keterampilan aparatur desa							
1.2	Kualitas pimpinan							
	a. Capaian kinerja							
	b. Kekompakan							
	c. Akurasi							
1.3	Kualitas tenaga pendukung							
2	Dukungan pendanaan (<i>money</i>)							
2.1	Ketepatan mempergunakan uang desa/kelurahan							
2.2	Penguatan keuangan desa/kelurahan							
	a. Kecukupan anggaran desa							
	b. Pendapatan desa							
3	Material (<i>materials</i>)							
3.1	Keberadaan sarana							
3.2	Keberadaan sumber daya alam							
4	Mesin (<i>Mechine</i>)							
4.1	Jumlah ketersediaan inventaris desa							
4.2	Kelengkapan prasarana							
	a. Ketersediaan lahan desa							
	b. Ketersediaan bangunan desa							
5	Metode (<i>method</i>)							
5.1	Dukungan jumlah jam kerja							
5.2	Dukungan akan peralatan							
5.3	Cara capaian kinerja							
	a. Koordinasi dengan instansi terkait							
	b. Menentukan target yang akan dicapai							
6.	Pemasaran (<i>market</i>)							
6.1	Kualitas jasa pelayanan terhadap masyarakat							
	a. Layanan Jasa terhadap keperluan masyarakat							
	b. Layanan Jasa terhadap kepuasan masyarakat							
6.2	Standar layanan yang diberikan							
6.3	Manfaat layanan jasa yang diberikan							